

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**EVALUASI KINERJA TPID DALAM RANGKA PENGENDALIAN  
INFLASI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat  
Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**SITI MASRURAH**

**NIM. 501575229**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2019**

**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul “Evaluasi Kinerja TPID dalam rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara” Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tanjung Selor, 30 November 2018

Yang Menyatakan

  
**(SITI MASRURAH)**

NIM. 501575229

## ABSTRAK

# EVALUASI KINERJA TPID DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Siti Masrurah

sitimasrurah88@yahoo.com

Program Pascasarjana

Universitas Terbuka

*Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai evaluasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mengenai evaluasi kinerja TPID dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Utara. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Informan penelitian ini adalah anggota TPID Provinsi Kalimantan Utara. Instrumen penelitian yang digunakan adalah (a) Pedoman Wawancara, (b) Panduan Observasi berupa pengamatan terhadap obyek yang diteliti, dan (c) Dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan observasi lapangan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas tim telah mampu memberikan rekomendasi solusi yang dihasilkan dan memerlukan penanganan langsung dari Pemerintah Pusat dikomunikasikan oleh Pokjanas TPID kepada kementerian/lembaga terkait. Pemrosesan informasi, TPID Provinsi Kalimantan Utara telah memproses informasi mengenai perkembangan inflasi di Provinsi Kalimantan Utara dan setiap Kabupaten/Kota dengan baik. Analisis kritis, TPID belum mampu menyusun sebuah kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran. Kesadaran diri, TPID Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki kesadaran diri yang tinggi dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Kualitas kebijakannya adalah kebijakan yang telah ditetapkan Provinsi Kalimantan Utara masih standar. Akuntabilitas adalah kebijakan yang telah ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi tujuan, alasan pengambilan kebijakan.*

*kata kunci : evaluasi, inflasi, kinerja, pengendalian.*

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM (TAPM)

Judul TAPM : Evaluasi Kinerja TPID dalam rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara

Nama : SITI MASRURAH

NIM : 501575229

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Jumat / 30 November 2018

**Menyetujui :**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. M. Riduan Karim, SE, MM**

**Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si, PhD.**

**Mengetahui,**

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan  
Politik, Pengelola Program Magister  
Administrasi Publik

Dekan FHNSIP

**Dr. Darmanto, M.Ed.**

NIP. 1959'027 198603 1 003



**Dr. Sofjan Aripin, M. Si**

NIP. 19660619 199203 1 002

**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : SITI MASRURAH  
NIM : 501575229  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Judul TAPM : Evaluasi Kinerja TPID dalam rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Jum'at/30 November 2018

Waktu : 19.30 – 21.00

Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua Komisi Penguji

**Dr. Agus Santoso, M.Si**

Penguji Ahli

**Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si**

Pembimbing I

**Dr. M. Riduan Karim, SE., MM**

Pembimbing II

**Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D.**

## KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka, disamping manfaat yang ingin disumbangkan kepada pihak yang berkepentingan.

Penulisan tesis ini merupakan kesempatan yang tepat untuk berbagi pengetahuan dan teori dari mata kuliah yang diperoleh selama masa perkuliahan untuk diterapkan di tempat kerja dan kehidupan bermasyarakat. Banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, baik berupa motivasi maupun pendapat dan saran dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Bapak Dr. M. Riduan Karim, SE. MM. selaku Pembimbing I dan Bapak Made Yudhi Setiani, SIP., M.Si., selaku dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran telah memberikan dorongan dan bimbingan selama penyelesaian TAPM ini. Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

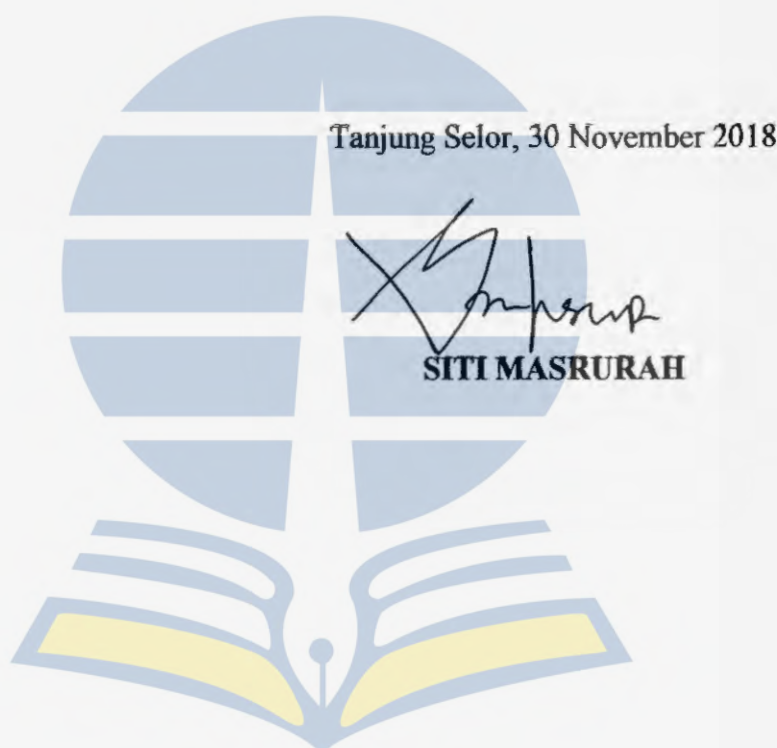
1. Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka
2. Dr. Drs. Sofjan Aripin, M.Si, selaku Dekan FHISIP UT
3. Dr. Drs. Darmanto, M.Ed selaku Kepala Bidang Prodi Magister Administrasi Publik.
4. Seluruh Dosen pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ-UT Tarakan.
5. Seluruh informan penelitian, yaitu Pj. Sekretaris Daerah, Kepala Biro Perekonomian, Staff Bank Indonesia, pejabat terkait lainnya dalam TPID Provinsi Kalimantan Utara yang telah bersedia memberikan data, informasi dan keterangan yang sangat bermanfaat bagi penelitian ini.

Selain kepada pribadi-pribadi di atas, penulis ingin pula menorehkan catatan dan terima kasih khusus kepada: Ibunda tercinta dan suami serta anak-anakku sebagai motivator utama dan saudara-saudara yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat

bagi semua terutama bagi peningkatan investasi yang akhirnya bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi guna mensejahterakan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa baik dalam penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi, TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik dan segala bentuk pengarahannya dari semua pihak untuk perbaikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telp. 021 7415050, Fax. 021 7415588

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : SITI MASRURAH

NIM : 501575229

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Tempat/Tanggal Lahir : Bunyu, 10 Maret 1978

Riwayat Pendidikan : Lulus SD Patra Darma Tahun 1990

Lulus SMPN Bunyu pada Tahun 1993

Lulus Madrasah Muallimat Muhammadiyah Tahun 1996

Lulus S1 Universitas Ahmad Dahlan Muhammadiyah  
Yogyakarta Pada Tahun 2001

Riwayat Pekerjaan : -

Alamat Rumah : Jl. Jelarai Raya Tanjung Selor

No. Telp. : -

Tanjung Selor, 30 November 2018

**SITI MASRURAH**

NIM. 501575229

## DAFTAR ISI

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN ..... | i   |
| DAFTAR ISI .....        | ix  |
| DAFTAR TABEL .....      | xi  |
| DAFTAR GAMBAR .....     | xii |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. Identifikasi Masalah .....   | 10 |
| C. Perumusan Masalah .....      | 11 |
| D. Tujuan Penelitian .....      | 11 |
| E. Manfaat Penelitian .....     | 12 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Evaluasi Kinerja .....                                                               | 13 |
| B. Evaluasi Kinerja TPID dalam Rangka Pengendalian Inflasi<br>di Kalimantan Utara ..... | 20 |
| C. Penelitian Terdahulu .....                                                           | 23 |
| D. Kerangka Berpikir .....                                                              | 32 |

### BAB III METODE PENELITIAN

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| A. Desain Penelitian .....                       | 35 |
| B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan ..... | 36 |
| C. Lokasi Penelitian .....                       | 37 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| D. Jenis Data .....             | 37 |
| E. Sumber Data.....             | 38 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| G. Metode Analisis Data.....    | 39 |

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara .....                     | 43 |
| B. Gambaran Umum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)              |    |
| Kalimantan Utara .....                                               | 49 |
| C. Hasil Penelitian Evaluasi Kinerja TPID                            |    |
| dalam rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara ..... | 55 |
| D. Pembahasan.....                                                   | 85 |

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 108 |
| B. Saran .....      | 110 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>112</b> |
|----------------------------|------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>LAMPIRAN .....</b> | <b>114</b> |
|-----------------------|------------|

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1. Pencapaian Target Inflasi Indonesia.....                                                                                           | 2  |
| Tabel 1.2 Inflasi Provinsi Kalimantan Utara .....                                                                                             | 3  |
| Tabel 1.3. Inflasi Kalimantan Utara Menurut Kelompok<br>Pengeluaran Secara Bulanan (mtm) Periode<br>Januari 2017-November 2017 (Persen) ..... | 4  |
| Tabel 1.4 Inflasi di Kota Tarakan Tahun 2010 – 2018.....                                                                                      | 6  |
| Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....                                                                                                          | 27 |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian .....                                                                                                           | 36 |
| Tabel 4.1. Jumlah Populasi Penduduk di Kabupaten/Kota<br>se Provinsi Kalimantan Utara .....                                                   | 45 |
| Tabel 4.2. Perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Utara Sepanjang Tahun<br>2016 – 2018 .....                                                | 56 |
| Tabel 4.3. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi kaltara Triwulan 2018 .....                                                                     | 63 |
| Tabel 4.4. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Transport,<br>Komunikasi dan Jasa Keuangan Kaltara Triwulan II 2018 (yoy) .....        | 64 |
| Tabel 4.5. Komoditas Penyumbang Inflasi Kelompok bahan makanan Kaltara<br>Triwulan Kedua 2018 (yoy).....                                      | 65 |
| Tabel 4.6. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok<br>Lainnya Kaltara Triwulan II 2018 (yoy) .....                                        | 66 |
| Tabel 4.7 Perbandingan Inflasi Kaltara Triwulan II 2017 dan Triwulan II 2018.....                                                             | 66 |
| Tabel 4.8. Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Wilayah Kaltara Awal<br>Tahun 2018 sampai Awal Tahun 2019.....                         | 73 |
| Tabel 4.9. Pokok-Pokok Kesepakatan1 Rakorwil TPID KTI Tahun 2018 .....                                                                        | 91 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....                                 | 34 |
| Gambar 3.1. Komponen-Komponen Analisis dan Metode Interaktif..... | 40 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Boediono (1980:105) mengemukakan bahwa inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi merupakan masalah besar dalam perekonomian setiap negara dan yang selalu meresahkan negara. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang diambil untuk mengatasi inflasi sering menjadi pisau bermata dua yang akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Secara historis inflasi Indonesia terbagi dalam beberapa siklus sebagai berikut (1) Siklus Februari sampai Mei, inflasi cenderung rendah, (2) Siklus Juni sampai Agustus, inflasi tinggi disebabkan oleh peningkatan permintaan pada hari raya Idul Fitri, (3) siklus September sampai November, inflasi cenderung rendah dan (4) siklus Desember- Januari, inflasi tinggi disebabkan oleh peningkatan permintaan menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru.

Laju inflasi di Indonesia pada tahun 2012 telah menunjukkan kecenderungan penurunan. Inflasi inti Indonesia jatuh dari 6,6% pada tahun 2006 menjadi 4,3% di tahun 2012. Penurunan inflasi yang signifikan terjadi pada sektor pangan dari 10,7% di tahun 2006 menjadi 5,7% di tahun 2012, sementara inflasi pada sektor non pangan hanya menurun dari 3,9% menjadi 3,2% dalam periode yang sama. Akibatnya, harga pangan di Indonesia menjadi lebih tinggi dan lebih bergejolak dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini

Tabel 1.1. Pencapaian Target Inflasi Indonesia Sepanjang Tahun 2001 - 2018

| Tahun | Target Inflasi   | Inflasi Aktual (% , yoy) |
|-------|------------------|--------------------------|
| 2001  | 4%-6%            | 12,55                    |
| 2002  | 9%-10%           | 10,03                    |
| 2003  | $9 \pm 1 \%$     | 5,06                     |
| 2004  | $5,5 \pm 1\%$    | 6,40                     |
| 2005  | $6 \pm 1 \%$     | 17,11                    |
| 2006  | $8 \pm 1\%$      | 6,60                     |
| 2007  | $5 \pm 1\%$      | 6,59                     |
| 2008  | $5 \pm 1\%$      | 11,06                    |
| 2009  | $4,5 \pm 1 \%$   | 2,78                     |
| 2010  | $5 \pm 1 \%$     | 6,96                     |
| 2011  | $5 \pm 1 \%$     | 3,79                     |
| 2012  | $4,5 + 1 \%$     | 4,30                     |
| 2013  | $4,5\% \pm 1 \%$ | 8,38                     |
| 2014  | $4,5\% \pm 1 \%$ | 8,36                     |
| 2015  | $4\% \pm 1 \%$   | 3,35                     |
| 2016  | $4\% \pm 1 \%$   | 3,02                     |
| 2017  | $4\% \pm 1 \%$   | 2,95                     |
| 2018  | $3,5\% \pm 1 \%$ | 3,23 (Bulan Mei)         |

Sumber Data : Laporan Tahunan Bank Indonesia diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa inflasi aktual di Indonesia masih sering meleset dari target inflasi yang ditetapkan. Dari sebelas pengamatan, hanya ada tiga pengamatan yang memenuhi target inflasi, yaitu pada tahun 2004, 2006 dan 2007. Selebihnya inflasi aktual yang terjadi ada beberapa yang melebihi target inflasi maupun lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Bahkan pada tahun 2001, 2005, 2008 dan 2013, inflasi aktual yang terjadi sangat jauh melampaui target inflasinya. Hal ini disebabkan oleh adanya krisis keuangan global dan naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM). Setelah tahun 2008, kondisi inflasi Indonesia cenderung membaik.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat inflasi tinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dikarenakan belum banyak daerah yang terintegrasi satu sama lain. Sejak 2014, inflasi provinsi ini 11,9% dan tahun 2015 berhasil ditekan ke level 3,24%. Di 2016 laju inflasi kembali naik menjadi 4,3%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Inflasi Provinsi Kalimantan Utara Sepanjang Tahun 2013 - 2018

| Tahun | Inflasi Aktual (% , yoy) |
|-------|--------------------------|
| 2013  | 10,35                    |
| 2014  | 11,51                    |
| 2015  | 3,42                     |
| 2016  | 4,31                     |
| 2017  | 2,77                     |
| 2018  | 3,33 (Agustus)           |

*Sumber Data : Laporan Tahunan Bank Indonesia diolah, 2018*

Dari Tabel 1.2. di atas dapat diketahui bahwa pada Triwulan I 2017, ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara) tumbuh sebesar 6,17 persen (*year on year/yoy*). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2016, maupun rata-rata pertumbuhan provinsi di Kalimantan pada periode yang sama. Inflasi Kaltara triwulan III 2017 tercatat 3,61% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,39% (*yoy*). Penurunan inflasi Kaltara tersebut sejalan dengan inflasi nasional yang turut mengalami penurunan dari 4,37% (*yoy*) pada triwulan II 2017 menjadi 3,72% (*yoy*) di triwulan III 2017. Secara historis inflasi Kaltara triwulan III 2017 masih lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Kaltara 3 (tiga) tahun terakhir. Secara spasial di wilayah Kalimantan, Inflasi Kaltara triwulan III lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.

**Tabel 1.3. Inflasi Kalimantan Utara Menurut Kelompok Pengeluaran**  
**Secara Bulanan (mtm) Periode Januari 2017-November 2017**  
**(Persen)**

| No. | Kelompok Pengeluaran                         | Inflasi Bulanan (%) |          |          |          |          |           |           |           |           |          |          |
|-----|----------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
|     |                                              | Jan 2017            | Feb 2017 | Mar 2017 | Apr 2017 | Mei 2017 | Juni 2017 | Juli 2017 | Agus 2017 | Sept 2017 | Okt 2017 | Nov 2017 |
| 1.  | Bahan Makanan                                | 0,46                | -0,24    | 0,31     | -0,01    | 0,31     | 0,66      | 1,33      | -2,2      | -1,11     | -1,6     | -0,96    |
| 2.  | Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau    | 0,05                | 0,05     | -0,004   | 0,11     | 0,04     | -0,003    | 0,73      | 0,43      | 0,09      | -0,03    | 0,09     |
| 3.  | Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar | 0,06                | 0,09     | 0,08     | 0,11     | 0,06     | 0,33      | 0,01      | -0,22     | 0,16      | 0,01     | 0,12     |
| 4.  | Sandang                                      | 0,001               | 0,02     | 0,02     | 0,02     | 0,02     | 0,03      | 0,03      | 0,06      | 0,19      | 0        | 0,05     |
| 5.  | Kesehatan                                    | 0,02                | 0,02     | 0,04     | 0,01     | 0,01     | 0,01      | 0,05      | 0,13      | 0,56      | 0,07     | 0,08     |
| 6.  | Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga            | 0,02                | -0,003   | -0,004   | 0,02     | 0,01     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,05      | -0,01    | 0,00     |
| 7.  | Transportasi dan komunikasi                  | 0,09                | 0,11     | -0,05    | 0,02     | 0,05     | 0,86      | -5,62     | -2,24     | -0,35     | 0,19     | 0,13     |
| 8.  | Umum                                         | 0,69                | 0,04     | 0,4      | 0,27     | 0,51     | 1,89      | -0,27     | -0,8      | -0,24     | -0,4     | -0,18    |

Sumber Data : BPS Provinsi Kalimantan Timur diolah 2017

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas diketahui bahwa selama periode Januari hingga November 2017 inflasi Kalimantan Utara tertinggi pada menjelang momen hari raya Idul Fitri (bulan Juni 2017) yang secara bulanan (mtm) tercatat sebesar 1,89%. Sementara itu deflasi terendah terjadi pada Agustus 2017 yang secara bulanan (mtm) tercatat -0,80%. Selama periode Juli hingga November 2017 Kalimantan Utara terus mengalami tren deflasi yang sangat positif untuk pencapaian target inflasi nasional sebesar  $4 \pm 1\%$ .

Berdasarkan disagregasinya, meredanya tekanan inflasi pada kelompok *volatile food* dan *administered prices* menjadi penyebab menurunnya inflasi Kaltara triwulan III 2017. Inflasi kelompok *volatile food* pada triwulan III 2017 tercatat 5,37% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 7,55% (yoy). Meredanya tekanan inflasi pada kelompok *volatile food* didorong oleh kenaikan pasokan di beberapa komoditas pangan strategis. Selain itu, inflasi kelompok *administered prices* tercatat 3,45% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,50% (yoy). Penurunan angka inflasi pada kelompok ini disebabkan karena penurunan tarif angkutan

udara dampak dari normalisasi permintaan masyarakat terhadap transportasi udara pasca hari raya Idul Fitri dan mudik Lebaran. Lebih lanjut, inflasi kelompok inti mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan pertumbuhan konsumsi RT pada PDRB yang juga tercatat sedikit melambat pertumbuhannya. Di triwulan IV 2017, inflasi Kaltara diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya berada pada rentang 2,90 - 3,30% (yoy).

Beberapa risiko yang dapat menjadi faktor pendorong inflasi di akhir tahun 2017 antara lain (a) risiko cuaca dan gelombang tinggi di wilayah perairan Kalimantan Utara yang akan berdampak pada hasil tangkapan ikan, (b) kenaikan harga BBM sejalan dengan mulai naiknya harga minyak dunia, (c) risiko lonjakan harga bahan pangan dan kenaikan permintaan tiket pesawat dalam rangka persiapan datangnya hari Natal dan Tahun Baru dan (d) risiko berkurangnya pasokan pada komoditas pangan strategis pasca berakhirnya musim panen.

Selama ini inflasi Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada perhitungan inflasi Kota Tarakan. Inflasi di wilayah lain seperti Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung dilakukan perhitungan melalui pendekatan *sister city*. Pendekatan ini menggunakan diagram timbang Kota SBH (Survei Biaya Hidup) yang memiliki pola konsumsi hampir sama dan letaknya berdekatan secara geografis. Variabel lain yang menjadi pertimbangan dalam pendekatan ini adalah besaran Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk dalam satu provinsi mitra kota (*sister city*). Dari pendekatan *sister city* yang disusun, maka bisa ditetapkan bahwa daerah lain di Kaltara ini memiliki kesesuaian adalah Tarakan. Untuk lebih jelasnya mengenai inflasi Kota Tarakan dapat dilihat pada Tabel 1.4 di bawah ini.

**Tabel 1.4 Inflasi di Kota Tarakan Tahun 2010 – 2018**

| <b>Tahun</b> | <b>Inflasi Aktual (% , yoy)</b> |
|--------------|---------------------------------|
| 2010         | 7,92                            |
| 2011         | 6,43                            |
| 2012         | 5,99                            |
| 2013         | 10,35                           |
| 2014         | 11,91                           |
| 2015         | 3,24                            |
| 2016         | 0,82                            |
| 2017         | 0,69                            |
| 2018         | 0,49 (Januari)                  |

*Sumber Data : Laporan Tahunan Bank Indonesia diolah, 2018*

Dari Tabel 1.4 di atas, inflasi Kalimantan Utara berdasarkan inflasi Kota Tarakan pada November 2017 secara bulanan (mtm) tercatat sebesar -0,18 persen, inflasi tahun kalender (ytd) sebesar 1,88 persen dan inflasi *year on year* (yoy) sebesar 2,30 persen. Kategori inflasi dengan angka tersebut tergolong deflasi. Deflasi tersebut terjadi karena adanya penurunan indeks harga yang signifikan pada beberapa kelompok bahan makanan sebesar 0,96 persen. Sedangkan, kelompok pengeluaran lainnya mengalami peningkatan, diantaranya kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 0,13 persen diikuti oleh kelompok perumahan, air listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,12 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,09 persen, kelompok kesehatan dengan inflasi 0,08 persen, kelompok sandang sebesar 0,05 persen dan untuk kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga tidak mengalami inflasi maupun deflasi (0,00 persen)

Inflasi tahunan kota Tarakan tahun 2016 yaitu 0,82 persen. Tahun 2017, inflasi tercatat menyentuh angka 0,69 persen. Pada Januari 2018, sebagian besar kota pantauan inflasi di Indonesia mengalami inflasi. Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara, kota yang menjadi IHK adalah Tarakan. Pada Januari 2018, berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Tarakan mengalami inflasi sebesar 0,49 persen

dengan tingkat inflasi kalender sebesar 0,49 persen dari tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 2,57 persen. Inflasi di Tarakan dipengaruhi oleh peningkatan indeks harga pada kelompok bahan makanan sebesar 2,54 persen. Sementara kelompok makanan jadi, minuman, rokok, tembakau sebesar 0,48 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,17 persen. Lalu, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,11 persen, kelompok sandang 0,07 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,01 persen. Pada tahun 2016, Inflasi di Kabupaten Tana Tidung sebesar 2,4 persen.

Inflasi yang tinggi di Kalimantan Utara tentu membuat sebagian masyarakat Kalimantan Utara menjadi khawatir. Sebab ketidakseimbangan antara kenaikan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi akan membuat ketidakstabilan perekonomian. Untuk itu inflasi yang tinggi perlu dikendalikan. Dalam masa desentralisasi, upaya untuk mengendalikan inflasi regional di Indonesia telah didukung oleh koordinasi institusional antara Bank Indonesia dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. *Regional Inflation Task Force* (RITF) dibentuk sebagai tim antar instansi agar tugas utama untuk memantau inflasi regional secara melekat dan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk mengendalikan inflasi regional. Selain itu, Pokjanas TPID dibangun sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah yang memerlukan kebijakan pemerintah pusat.

Tugas Pokjanas TPID secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tugas yang dilakukan oleh masing-masing anggota (Tugas Para Pihak) dan tugas yang dalam pelaksanaannya diemban bersama (Tugas Kolektif). Tugas Para Pihak merupakan tugas yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing unsur yang terlibat dalam Pokjanas TPID (Kemenko, BI, dan Kemendagri) sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok masing-masing instansi. Sementara tugas kolektif merupakan tugas bersama dalam rangka mengkoordinasikan pelaporan dan evaluasi TPID, memfasilitasi pembentukan

TPID, dan strategi pengembangan TPID, serta edukasi/sosialisasi kepada publik terkait berbagai isu tentang stabilitas harga.

Pokjanas TPID berperan dalam mengkoordinasikan sekaligus mengarahkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Keanggotaan TPID yang terdiri atas berbagai instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya sejauh ini mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh TPID Kalimantan Utara untuk mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut (1) Menjaga dan meningkatkan produktifitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil pertanian khususnya komoditas bahan pangan pokok. (2) Mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran produksi dan distribusi hasil pertanian khususnya komoditas bahan pangan pokok. (3) Mendorong terciptanya struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien, khususnya untuk komoditas yang menjadi kebutuhan pokok. (4) Mengelola dampak dari penyesuaian harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, seperti harga BBM, tarif listrik, bea balik nama kendaraan bermotor, tarif angkutan dan tarif pelabuhan. (5) Mendorong ketersediaan informasi terkait produksi, ketersediaan dan harga bahan pangan pokok yang kredibel, terkini dan mudah diakses oleh masyarakat. (6) Melakukan koordinasi yang intensif diantara SKPD dalam satu wilayah dan wilayah lainnya, kantor perwakilan Bank Indonesia, lembaga pemerintah terkait pangan di daerah, serta beberapa pihak terkait untuk menjamin produksi, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok.

Berdasarkan kebijakan yang dibuat di atas diketahui bahwa TPID belum terlalu apik dalam mengendalikan inflasi di Kalimantan Utara. Hal ini disebabkan karena perekonomian Kalimantan Utara selama ini masih berfokus pada sektor pertambangan. Kebijakan yang diambil instansi terkait belum tepat sasaran yaitu hanya melakukan operasi pasar pada saat-saat tertentu, dimana kebijakan operasi pasar ini tidak terlalu memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengendalian inflasi di daerah.

Operasi pasar murah adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (*government securities*). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Operasi pasar dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka melindungi konsumen karena harga barang yang berlaku di pasar sangat tinggi. Ketika harga bahan pokok di pasar terlalu tinggi, maka pemerintah melalui lembaga terkait menambah jumlah penawaran atau pasokan bahan pokok, sehingga harga bahan pokok dapat normal kembali. Operasi pasar murah ini dioperasikan di 5 (lima) titik per kabupaten/kota. Operasi pasar ini biasa dilaksanakan tiap tahun pada bulan ramadhan. Operasi pasar ini tergolong kebijakan pengendalian inflasi yang sudah biasa dan tidak berisiko tinggi. Kebijakan operasi pasar yang telah dibuat oleh pemerintah ternyata tidak memberikan pengaruh apapun dalam pengurangan tingginya tingkat inflasi daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

Kenyataan di atas diketahui bahwa kebijakan yang telah dibuat TPID berupa operasi pasar tidak pernah berhasil untuk mengendalikan laju inflasi daerah atau dengan kata lain tidak berhasil. Faktor penyebab ketidakberhasilan kebijakan yang telah disusun TPID adalah karena (1) intensitas koordinasi kegiatan antar anggota TPID masih rendah. Koordinasi hanya dilakukan jika terdapat permasalahan mendesak; (2) Rapat Teknis TPID dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali se tahun; (3) TPID masih tidak memberikan

rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi/inspeksi lapangan, dan belum ada tindak lanjut terhadap rekomendasi kebijakan; (4) Koordinasi hanya dibahas oleh pejabat tingkat atas (Gubernur), (5) *High level meeting* TPID dan Rakorwil masih memiliki dampak yang rendah dalam pengendalian inflasi daerah; (5) Pengelolaan ekspektasi masyarakat belum ada; (6) Belum pernah menyelenggarakan konferensi pers, (7) realisasi inflasi di Kalimantan Utara masih tergolong tinggi 3,23% yoy (bulan mei), (8) adanya TPID belum mampu menciptakan stabilitas harga pokok di Kalimantan Utara, serta (9) TPID belum mampu merespon dengan baik mengenai permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat inflasi stabil.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai evaluasi kinerja TPID dalam mengendalikan inflasi daerah. Evaluasi kinerja TPID Provinsi Kalimantan Utara diukur menggunakan metode *self assessment*. *Self assessment* merupakan suatu penilaian yang melibatkan TPID untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi TPID itu sendiri.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah penelitian mengenai evaluasi kinerja TPID dalam mengendalikan inflasi Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan yang dibuat TPID Provinsi Kalimantan Utara belum terlalu apik dalam mengendalikan inflasi di Kalimantan Utara ;
2. Kebijakan operasi pasar tidak pernah berhasil untuk mengendalikan laju inflasi daerah atau tidak berhasil ;
3. Intensitas koordinasi kegiatan antar anggota TPID masih rendah. Koordinasi hanya dilakukan jika terdapat permasalahan mendesak ;

4. Rapat teknis TPID dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali se tahun ;
5. TPID masih tidak memberikan rekomendasi kebijakan ;
6. Koordinasi hanya dibahas oleh pejabat tingkat atas (Gubernur) ;
7. *High level meeting* TPID dan Rakorwil masih memiliki dampak yang rendah dalam pengendalian inflasi daerah ;
8. Pengelolaan ekspektasi masyarakat belum ada ;
9. Belum pernah menyelenggarakan knferensi pers ;
10. Realisasi inflasi di Kalimantan Utara tergolong tinggi 3,23% yoy (bulan mei) ;
11. Adanya TPID belum mampu menciptakan stabilitas harga pokok di Kalimantan Utara ; serta
12. TPID belum mampu merespon dengan baik mengenai permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat inflasi stabil.

### C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimanakah Evaluasi Kinerja TPID Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara?”

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah “menganalisis mengenaievaluasi kinerja TPIDdalam rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara”.

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk lengkapnya dapat dijelaskan di bawah ini

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait dengan penerapan teori-teori evaluasi kinerja dalam rangka memecahkan sebuah permasalahan publik.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang evaluasi kinerja TPID dalam mengendalikan inflasi daerah.

#### b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam menyusun peraturan pelaksana lebih lanjut terkait kebijakan dalam mengendalikan inflasi daerah.

#### c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat agar memahami peran dan kinerja TPID dalam mengendalikan inflasi daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Evaluasi Kinerja

##### 1. Evaluasi

Menurut William N. Dunn (2003:60) evaluasi adalah penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Menurut Taliziduhu Ndraha (1989:201) evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Sedangkan, menurut Yusuf (2000:3) evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. Berdasarkan pengertian evaluasi dari para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

##### 2. Kinerja

Kinerja menurut Mangkunegara (2009:18) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Muhammad Sandy (2015:11) kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pengertian kinerja menurut Moeheriono (2012:95) kinerja yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah

prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Agus Dwiyanto, ada 4 (empat) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik. Indikator-indikator tersebut adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, akuntabilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan berikut ini:

a. Produktivitas

Produktivitas menurut Muchdaryah Sinungan (2009:9) adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi berlangsung. Sumber-sumber tersebut dapat berupa tanah, bahan baku, dan bahan pembantu, pabrik, mesin-mesin dan alat-alat, tenaga kerja manusia. Menurut Sutrisno (2009), produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif, suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Berdasarkan pengertian para ahli di atas, maka produktivitas adalah hubungan antara keluaran (barang-barang atau jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang).

Menurut Ardana (2012) produktivitas seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap mental dan etika kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan sosial, lingkungan dan iklim kerja, hubungan industrial Pancasila (hubungan kerja yang sangat manusiawi), teknologi, sarana produksi, manajemen, dan kesempatan berprestasi.

Faktor-faktor yang digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja (Simamora, 2004: 612) adalah sebagai berikut:

(1). Kuantitas kerja

Kuantitas kerja yang dimaksud ialah seberapa banyak yang dihasilkan dari kinerja karyawan.

(2). Kualitas kerja

Kualitas kerja mengacu pada kualitas hasil, tidak pada kuantitas hasil.

(3). Ketepatan waktu

Ketepatan waktu adalah karyawan dalam bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

b. Kualitas layanan

Menurut Tjiptono (2004:59) kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat kunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Pengertian kualitas pelayanan menurut Parasuraman (Farida Jasfar, 2005:50), yaitu perbandingan antara layanan yang dirasakan pelanggan dengan kualitas layanan yang diharapkan pelanggan. MenurutLena Ellitan dan Lina Anatan (2007:47), pengertian kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layananyang diberikan mampu menyesuaikan dengan ekspektasi pelanggan, jadikualitas pelayanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginanpelanggan serta ketetapan penyampaian pelayanan tersebut membagi harapan pelanggan. Berdasarkan beberapa penjelasandi atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa baik pelayananyang diberikan dan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, dalam hal ini yaitu wajib pajak.

Indikator kualitas pelayanan menurut Kepmenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut :

1) Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2) Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3) Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4) Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6) Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7) Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

#### 8) Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

#### 9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

#### c. Responsivitas

Menurut Hormon (1995) responsivitas (*responsiveness*) adalah kemampuan pemerintah (organisasi) untuk mengenali kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas, mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurut Dilulio (1994) responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Indikator responsivitas dalam pelayanan menurut Maruti (2013) yaitu, (1) terdapat tidaknya keluhan dari pengguna jasa; (2) sikap aparat birokrat dalam merespon keluhan dari pengguna jasa; (3) penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan di masa mendatang; (4) berbagai tindakan aparat birokrat untuk memberikan kepuasan

pelayanan kepada pengguna jasa; (5) penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku

d. Akuntabilitas

Menurut Lenvinne (Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005:175) akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh *stakeholders*, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002: 20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Iman S. Tunggal dan Amin S. Tunggal (2002:7), akuntabilitas merupakan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *board of commissioners*, *board of directors*, *shareholders*, dan auditor (pertanggungjawaban wewenang, *traccable*, *reasonable*). Dari pengertian di atas secara umum bahwa akuntabilitas publik adalah suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh unit organisasi atau pihak-pihak yang berkepentingan secara terbuka kepada pihak-pihak yang memberikan pertanggungjawaban.

Indikator akuntabilitas menurut Hopwood dan Tomkins (1993) adalah sebagai berikut:

- (1). Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
  - a) Kepatuhan terhadap hukum;
  - b) Penghindaran korupsi dan kolusi.
- (2). Akuntabilitas Proses
  - a) Adanya kepatuhan terhadap prosedur;
  - b) Adanya pelayanan publik yang responsif;
  - c) Adanya pelayanan publik yang cermat;
  - d) Adanya pelayanan publik yang biaya murah.
- (3). Akuntabilitas program:
  - a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal;
  - b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat.
- (4). Akuntabilitas Kebijakan  
Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil

Berdasarkan penjelasan di atas untuk mengukur kinerja terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Produktivitas dari suatu organisasi dapat dilihat dari rasio input dan output. Kualitas layanan dapat dilihat dari sumber daya manusia dan kepuasan masyarakat. Responsivitas dapat dilihat dari prosedur dan keinginan masyarakat. Akuntabilitas dapat dilihat dari ukuran target yang dicapai.

## B. Evaluasi Kinerja TPID Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan beberapa teori di atas, maka penelitian ini menggunakan beberapa gabungan dari teori Kaufman, Dwiyanto dan Laporan TPID Bank Indonesia Tahun 2012 di atas, sehingga pada akhirnya teori yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Proses

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang di eksekusi. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui *system call create-process* yang membentuk proses turunan (*child process*) yang dilakukan oleh proses induk (*parent process*). Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses.

#### a. Responsivitas

Responsivitas adalah bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

#### b. Pemrosesan informasi

Pemrosesan informasi itu sendiri secara sederhana dapat diartikan suatu proses yang terjadi pada peserta didik untuk mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut dengan inti

pendekatannya lebih kepada proses memori dan cara berpikir. Dalam teori pemrosesan informasi, terdapat beberapa model mengajar mendorong pengembangan pengetahuan dalam diri siswa dalam hal mengendalikan stimulus yaitu mengumpulkan dan mengorganisasikan data, menyadari dan memecahkan masalah, mengembangkan konsep sehingga mampu menggunakan lambang verbal dan non verbal dalam penyampaian. Bahkan orientasi utama pada modelnya mengarah kepada kemampuan timdalam mengolah, menguasai informasi sehingga dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang akan didapatkannya.

c. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

2. Keluaran

a. Analisis Kritis

Analisis wacana kritis adalah mengungkap bagaimana kekuasaan, dominasi dan ketidaksetaraan dipraktikkan, direproduksi atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis. Analisis ini mengambil posisi non-konformis atau melawan arus dominasi dalam kerangka besar untuk melawan ketidakadilan sosial.

## b. Kesadaran Diri

Kesadaran diri adalah keadaan dimana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dengan setepat-tepatnya. Seseorang disebut memiliki kesadaran diri jika ia memahami emosi dan mood yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi mengenai dirinya sendiri, dan sadar tentang dirinya yang nyata. Kesadaran diri (*self awareness*) atau disebut pengetahuan diri (*self knowledge*) dimana individu sadar dengan dirinya sendiri, bahwa individu memiliki kekurangan serta kelebihan, serta dalam kesehariannya individu sadar hal tersebut adalah dirinya (Solso, 2008). Zeman (2001) membagi kesadaran ke dalam beberapa kategori antara lain: (1) kondisi terjaga, dalam kondisi saat individu memprsepsi dan berintraksi, (2) pengalaman, yang merupakan kesiagaan individu terhadap peristiwa yang berlangsung disekelilingnya, (3) kondisi mental individu, yang meliputi keyakinan, harapan, niat dan hasrat, dan (4) kesadaran diri individu itu meliputi rekognisi diri, pengetahuan diri, perasaan kepemilikan atas pikiran-pikiran, ide-ide, dan perasaan-perasaan individu sendiri.

Karakteristik kesadaran diri meliputi *Attention*, *Wakefulness*, *Architecture*, *Reccal of knowledge*, dan *emotive*. (Solso, 2008). *Attention* atau perhatian, dimana pemusatan sumber daya mental ke hal-hal eksternal maupun internal. Individu memperhatikan suatu objek dari luar dirinya untuk mendapatkan kesadaran tanggung jawab, selain isyarat-isyarat eksternal, individu dapat mengalihkan perhatian perhatian kedalam diri dan merenungkan pikiran-pikiran pribadi, memori-memori, cita-cita, sehingga kesadaran diri akan dapat terbentuk.

c. Kualitas Layanan

Menurut Tjiptono dan Chandra (2005) kualitas layanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar *good government* yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di berikan.

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan topik Evaluasi Kinerja TPID dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara, menurut sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Walaupun demikian penelitian mengenai Evaluasi Kinerja TPID dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara sudah ada yang meneliti. Peneliti tersebut diantaranya adalah:

1. Surya Dharma

Judul Penelitian “Analisis Peranan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap Pengendalian Inflasi di Provinsi Sumatera Utara”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adanya pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memiliki peranan mengurangi inflasi dan persistensi Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti setelah dibentuknya TPID, persistensi inflasi Provinsi Sumatera Utara relatif mengalami penurunan. Hal

ini menandakan Peranan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara memiliki kinerja yang cukup baik.

Inflasi Provinsi Sumatera memiliki tingkat persistensi yang relative rendah. Persistensi inflasi yang rendah mengindikasikan bahwa inflasi membutuhkan waktu yang relatif cepat untuk kembali ke nilai alamiahnya setelah adanya shock. Persistensi inflasi Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh shock yang terjadi pada komponen *administered price* dan *volatile foods*. Kelompok komoditi yang memberikan kontribusi besar pada persistensi inflasi yaitu kelompok kesehatan dan kelompok makanan.

Relatif rendahnya tingkat persistensi inflasi Provinsi Sumatera Utara tercermin dari lamanya jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk menyerap 50% shock yang terjadi sebelum kembali ke nilai alamiahnya. Jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk kembali ke nilai alamiahnya yaitu selama 10,3 hari. Sedangkan untuk masing-masing kelompok komoditi memerlukan waktu selama 3,3 hari hingga 16,15 hari. Kelompok komoditi dengan tingkat persistensi inflasi tertinggi adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar yang memerlukan waktu kurang lebih 14,56 hari sebelum kembali ke nilai alamiahnya. Sedangkan kelompok komoditi bahan makanan memerlukan waktu kurang lebih 12,58 hari untuk kembali ke nilai alamiahnya.

Persamaan penelitian Surya Dharma dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai inflasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan antara penelitian Surya Dharma dengan penelitian ini adalah penelitian Surya Dharma fokus penelitian lebih menitikberatkan pada persistensi inflasi sedangkan penelitian ini memiliki fokus penelitian yaitu analisis kebijakan pengendalian inflasi.

## 2. Darius Tirtosuharto dan Handri Adiwilaga (2017)

Penelitian ini berjudul "*Decentralizaion and Regional Inflation in Indonesia*". Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi berdampak terhadap inflasi regional di Indonesia, dimana kenaikan desentralisasi fiskal juga menaikkan volatilitas inflasi regional. Ini disebabkan salah satunya akibat pengeluaran pemerintah daerah yang tidak efisien. Meskipun variabel kinerja pemerintah daerah tidak signifikan, namun terdapat korelasi negatif antara kinerja pemerintah dengan inflasi regional, seperti yang diharapkan. Dengan demikian sampai batas tertentu, kelembagaan berperan dalam mengendalikan inflasi di daerah. Selain itu, terdapat juga indikasi bahwa institusi memiliki peran dalam mengurangi kesenjangan inflasi regional di Indonesia, meski konvergensi laju inflasi daerah tidak terbukti diamati dalam penelitian ini.

Dari perspektif spasial, terdapat bukti autokorelasi spasial yang tinggi atas inflasi regional di Indonesia. Selain itu, juga terdapat indikasi kuat kurangnya koordinasi antar daerah dalam mengendalikan inflasi daerah sebelum pembentukan RITF. Secara formal dalam studi ini kontribusi RIFT dalam mengendalikan volatilitas inflasi tidak dapat ditentukan meski korelasi diantara keduanya bernilai negatif seperti yang diharapkan. Mengingat permasalahan inflasi sebagian tergantung pada penawaran, maka koordinasi dan kerja sama antar lembaga-lembaga baik di tingkat pusat dan daerah menjadi sangat penting. Kedepannya, RITF sebaiknya memprioritaskan formulasi kebijakan jangka panjang untuk mengendalikan inflasi karena hal ini menyelesaikan permasalahan struktural dan memberikan inflasi yang lebih stabil.

Persamaan penelitian Darius Tirtosuharto dan Handri Adiwilaga dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pengendalian inflasi daerah. Sedangkan perbedaan penelitian Darius Tirtosuharto dan Handri Adiwilaga dengan

penelitian ini adalah penelitian Darius Tirtosuharto dan Handri Adiwilaga menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Untuk lebih singkatnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini



Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

| No | Judul                                                                                                                           | Peneliti            | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Persamaan                                                                                                                                           | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Analisis Peranan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap Pengendalian Inflasi di Provinsi Sumatera Utara | Surya Dharma (2012) | Adanya pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memiliki peranan mengurangi inflasi dan persistensi Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti setelah dibentuknya TPID, persistensi inflasi Provinsi Sumatera Utara relatif mengalami penurunan. Hal ini menandakan Peranan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara memiliki kinerja yang cukup baik<br><br>Inflasi Provinsi Sumatera memiliki tingkat persistensi yang relatif rendah. Persistensi inflasi yang rendah mengindikasikan bahwa inflasi membutuhkan waktu yang relatif cepat untuk kembali ke nilai alamiahnya setelah adanya <i>shock</i> . Persistensi inflasi Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh <i>shock</i> | Persamaan penelitian Surya Dharma dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai inflasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. | Perbedaan antara penelitian Surya Dharma dengan penelitian ini adalah penelitian Surya Dharma fokus penelitian lebih menitikberatkan pada persistensi inflasi sedangkan penelitian ini memiliki fokus penelitian yaitu analisis kebijakan pengendalian inflasi. |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>yang terjadi pada komponen <i>administered price</i> dan <i>volatile foods</i>. Kelompok komoditi yang memberikan kontribusi besar pada persistensi inflasi yaitu kelompok kesehatan dan kelompok makanan.</p> <p>Relatif rendahnya tingkat persistensi inflasi Provinsi Sumatera Utara tercermin dari lamanya jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk menyerap 50% <i>shock</i> yang terjadi sebelum kembali ke nilai alamiahnya. Jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk kembali ke nilai alamiahnya yaitu selama 10,3 hari. Sedangkan untuk masing-masing kelompok komoditi memerlukan waktu selama 3,3 hari hingga 16,15 hari. Kelompok komoditi dengan tingkat persistensi inflasi tertinggi adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar yang memerlukan waktu kurang lebih 14,56 hari sebelum</p> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                            |                                                 | kembali kenilai alamiahnya. Sedangkan kelompok komoditi bahan makanan memerlukan waktu kurang lebih 12,58 hari untuk kembali kenilai alamiahnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | <i>Decentralizaion and Regional Inflation in Indonesia</i> | Darius Tirtosuharto dan Handri Adiwilaga (2017) | Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi berdampak terhadap inflasi regional di Indonesia, dimana kenaikan desentralisasi fiskal juga menaikkan volatilitas inflasi regional. Ini disebabkan salah satunya akibat pengeluaran pemerintah daerah yang tidak efisien. Meskipun variabel kinerja pemerintah daerah tidak signifikan, namun terdapat korelasi negatif antara kinerja pemerintah dengan inflasi regional, seperti yang diharapkan. Dengan demikian sampai batas tertentu, sampai batas tertentu, kelembagaan berperan dalam mengendalikan inflasi di daerah. Selain itu, terdapat juga indikasi bahwa institusi | Persamaan penelitian Darius Tirtosuharto dan Handri Adiwilaga dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pengendalian inflasi daerah. | Perbedaan penelitian Darius Tirtosuharto dan Handri Adiwilaga dengan penelitian ini adalah penelitian Darius Tirtosuharto dan Handri Adiwilaga menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>memiliki peran dalam mengurangi kesenjangan inflasi regional di Indonesia, meski konvergensi laju inflasi daerah tidak terbukti diamati dalam penelitian ini.</p> <p>Dari perspektif spasial, terdapat bukti autokorelasi spasial yang tinggi atas inflasi regional di Indonesia. Selain itu, juga terdapat indikasi kuat kurangnya koordinasi antar daerah dalam mengendalikan inflasi daerah sebelum pembentukan RITF. Secara formal dalam studi ini kontribusi RITF dalam mengendalikan volatilitas inflasi tidak dapat ditentukan meski korelasi diantara keduanya bernilai negatif seperti yang diharapkan. Mengingat permasalahan inflasi sebagian tergantung pada penawaran, maka koordinasi dan kerja sama antar lembaga-lembaga baik di tingkat pusat dan daerah menjadi sangat penting.</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Kedepannya, RITF sebaiknya memprioritaskan formulasi kebijakan jangka panjang untuk mengendalikan inflasi karena hal ini akan menyelesaikan permasalahan structural dan memberikan inflasi yang lebih stabil. |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

*Sumber Data : Data Sekunder diolah, 2018*



#### D. Kerangka Berpikir

Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan perekonomian baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Inflasi Kalimantan Utara yang tinggi menjadi beban bagi semua pihak. Inflasi yang tinggi mengakibatkan daya beli menjadi lebih rendah atau menurun. Dengan menurunnya daya beli, maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik barang maupun jasa akan semakin rendah. Laju inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan perencanaan bagi dunia usaha, tidak mendorong masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi, menghambat perencanaan pembangunan oleh pemerintah, merubah struktur APBD dan berbagai dampak negatif lain yang tidak kondusif bagi perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, inflasi yang tinggi perlu segera diturunkan atau dikendalikan.

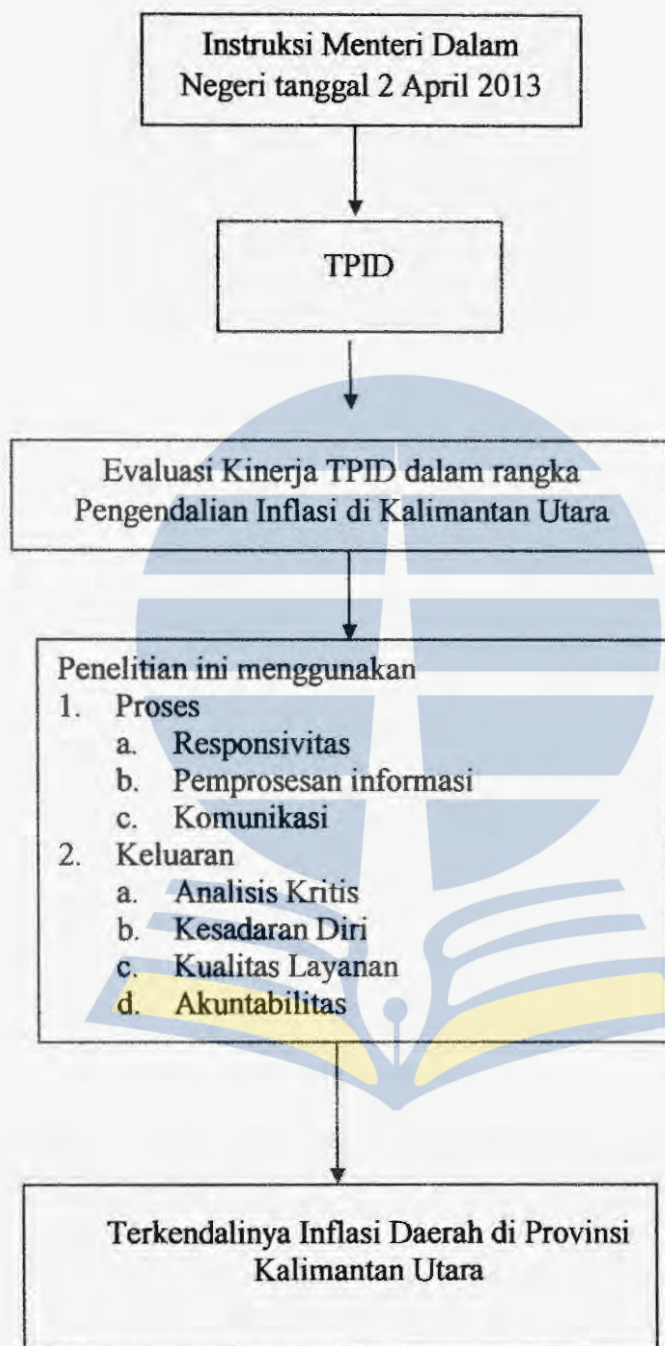
Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan apabila terjadi penyimpangan tersebut dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. Salah satu upaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan inflasi nasional dan inflasi daerah agar tetap stabil dan rendah adalah dengan membentuk TPID. TPID Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas yaitu (1) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa (2) menyusun kebijakan pengendalian inflasi nasional (3) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik daerah (4) melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah provinsi/kabupaten/kota (5) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan-permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan TPID Kalimantan Utara dalam menjaga stabilitas inflasi diantaranya adalah (1) menjaga dan meningkatkan produktivitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil pertanian khususnya komoditas bahan pangan pokok, (2) mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran produksi dan distribusi hasil pertanian khususnya bahan pangan pokok, (3) mendorong terciptanya struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien khususnya untuk komoditas yang menjadi kebutuhan pokok, (4) mengelola dampak dari penyesuaian harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, seperti harga BBM, tariff listrik, bea balik nama kendaraan bermotor, tariff angkutan dan tariff pelabuhan. (5) mendorong ketersediaan informasi terkait produksi, ketersediaan (stok) dan harga bahan pangan pokok yang kredibel, terkini dan mudah diakses oleh masyarakat (6) melakukan koordinasi yang intensif diantara SKPD dalam satu wilayah dan wilayah lainnya, kantor perwakilan Bank Indonesia, lembaga pemerintah terkait pangan di daerah, serta beberapa pihak terkait untuk menjamin produksi, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok.

Penelitian ini menggunakan metode *Self assessment* dan gabungan teori kinerja dari Agus Dwiyanto. *Self Assessment* merupakan suatu penilaian yang melibatkan TPID untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi diri mereka sendiri. Kajian ini dilatarbelakangi bahwa pilihan kebijakan untuk mengendalikan inflasi adalah pilihan kebijakan yang tidak berisiko tinggi, sering menjadi pisau permata dua yang akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi daerah secara agregat. Dengan penilaian *self assessment* ini diharapkan bisa dijadikan alternatif dalam penilaian kinerja TPID.

Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah

ini



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan riset pemasaran (Malhotra, 2007). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2011:4) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri atau karakteristik diantaranya (1) peneliti sendiri sebagai instrument utama untuk mendatangi secara langsung sumber data (2) mengimplementasikan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih cenderung kata-kata dari pada angka (3) menjelaskan bahwa hasil penelitian lebih menekankan kepada proses tidak semata-mata kepada hasil (4) melalui analisis induktif, peneliti mengungkapkan makna dari keadaan yang terjadi (5) mengungkapkan makna sebagai hal yang esensial dari pendekatan kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982:27-29).

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Menurut Emzir (2016:20) penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidik proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.

## B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. *Purposive sampling* dalam penelitian ini adalah Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Utara. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| No. | Informan                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara                                                             |
| 2.  | Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara                                                                                   |
| 3.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara                                                          |
| 4.  | Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara                                                         |
| 5.  | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara                                           |
| 6.  | Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara                                                                          |
| 7.  | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara                                                         |
| 8.  | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara                                                                            |
| 9.  | Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara                                                                 |
| 10. | Kepala Bagian Industri dan Jasa Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara                                |
| 11. | Kepala Bagian Sarana Perekonomian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara                         |
| 12. | Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara           |
| 13. | Kepala Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara |
| 14. | Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara                   |

Sumber Data: SK TPID Provinsi Kalimantan Utara, 2018

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Utara. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah Kalimantan Utara adalah karena pada Januari 2018 inflasi Kalimantan Utara tergolong tinggi. Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pengendalian inflasi daerah, dan sampai sekarang keberadaan TPID Provinsi Kalimantan Utara belum dilakukan evaluasi kinerja sama sekali.

### D. Jenis Data

Data adalah informasi, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan bukti atau acuan. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi dari instansi maupun pihak -pihak lain yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Contoh data hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan.
2. Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka yang dapat dihitung. Contohnya adalah data inflasi bulanan (*month to month*) data dikur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kalimantan Utara periode bulan Januari – Desember lima tahun kebelakang; Data kelompok komoditi penyusun Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan Provinsi Kalimantan Utara yang dikategorikan dalam 7 kelompok pengeluaran berdasarkan COICOP (*The Classification Of Individual Consumption By Purpose*) periode Januari – Desember.

## E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber Data terdiri atas dua yaitu data primer dan data sekunder:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara meneliti langsung kepada Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Data ini diperoleh melalui observasi, dan wawancara.

### 2. Data Sekunder

Data sekunderyaitu sumber data yang akan melengkapi sumber data primer yaitu dokumen-dokumen yang membantu dalam penelitian (dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah, laporan-laporan, buku, jurnal, internet, media massa cetak, dan arsip-arsip lainnya).

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi.

### 1. Observasi Partisipan

Observasi partisipan (Emzir, 2016:39) adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Artinya dalam penelitian ini, peneliti memainkan dua peran yaitu pertama berperan sebagai salah satu anggota TPID Provinsi Kalimantan

Utara dan kedua sebagai peneliti yang mengumpulkan data tentang perilaku TPID dan perilaku individu masing-masing. Observasi ini dilakukan sepanjang waktu mulai dari April sampai dengan Oktober 2018 atau sampai data-data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara menurut Sutrisno Hadi (2016: 264) adalah metode pengumpulan data dengantanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Sebelum melakukan wawancara kepada informan, peneliti membuat pedoman terlebih dahulu. Pedoman wawancara memiliki fungsi yaitu memberikan bimbingan secara memokok apa-apa yang akan ditanyakan, menghindarkan kemungkinan melupakan beebberapa persoalan yang relevan terhadap pokok-pokok penyelidikan, dan meningkatkan wawancara sebagai suatu metode yang hasilnya memenuhi prinsip komparabilitas.

## 3. Dokumentasi

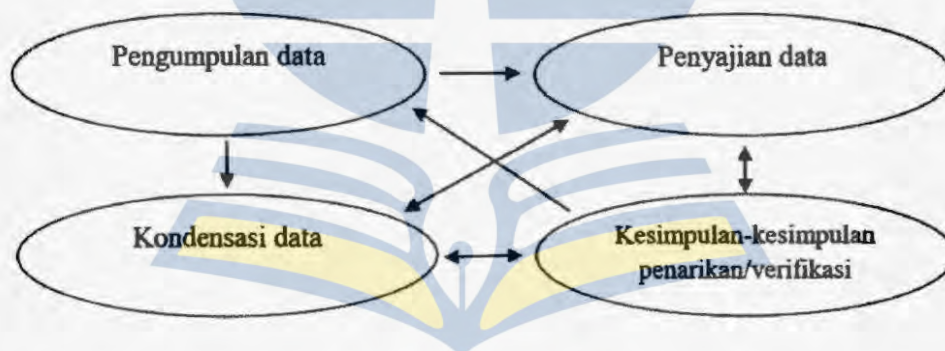
Menurut Burhan Bungin (2015:124), metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data dokumentasi dalam penelitian ini yaitu buku-buku kliping, dokumen pemerintah, data di *server* dan flashdisk, serta data tersimpan di web site dan lain-lain.

## G. Metode Analisis Data

Menurut Moleong (2004:280), analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam teori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankanoleh data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara, peneliti sudah

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang kredibel.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif studi kasus ini dilakukan secara terus menerus sehingga diperoleh data yang kredibel. Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Salda (2014) akan diterapkan sebagaimana berikut:



Gambar 3.1. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif  
Sumber : Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14

a. Kondensasi Data (*Data condensation*)

Miles dan Huberman (2014: 10) "*Data condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions*". Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan

mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

(1). *Selecting*

Menurut Miles dan Huberman (2014:18) peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

(2). *Focusing*

Miles dan Huberman (2014: 19) menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk praanalisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah.

(3). *Abstracting*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.

(4). *Simplifying dan Transforming*

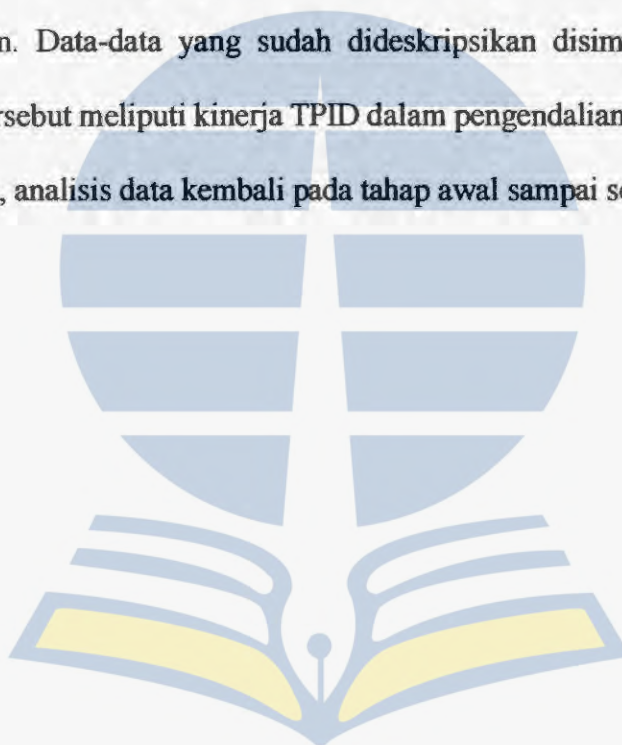
Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Untuk menyederhanakan data, peneliti menumpulkan data setiap proses dan konteks sosial dalam tabel.

b. Penyajian data (*Data display*)

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan bagan yang menggambarkan analisis pada evaluasi kinerja TPID dalam pengendalian inflasi daerah. Penyajian data berupa tabel dan bagan yang menunjukkan gambaran kinerja TPID dalam pengendalian inflasi daerah dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

c. Kesimpulan, penarikan/verifikasi (*Conclusion, drawing/verification*).

Penelitian menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum. Simpulan tersebut meliputi kinerja TPID dalam pengendalian inflasi daerah. Setelah disimpulkan, analisis data kembali pada tahap awal sampai semua data kompleks.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara

Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan dan Kerajaan Tidung. Kedua-duanya, yaitu negeri Kesultanan Bulungan dan Negeri Kerajaan Tidung merupakan bekas daerah bagian milik dari negara Berau yang telah melepaskan diri, namun kemudian menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu. Namun Kerajaan Berau menurut Menurut Hikayat termasuk salah satu Vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu). Sampai tahun 1850, negeri Bulungan dan negeri Tidung masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala negara Kesultanan Sulu [bekas bawahan Brunei]. Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan dan negeri Tidung sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau. Walaupun belakangan negeri Bulungan dibawah kekuasaan Pangeran dari Brunei dan negeri Tidung dibawah kekuasaan menantu Raja Tidung yang merupakan Pangeran dari Sulu, namun kedua negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau.

Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi ke-34 di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia Timur (Negara Bagian Sabah dan Sarawak). Pada tanggal 22 April 2013 telah dilantik Penjabat Gubernur Kalimantan Utara oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yaitu Dr. H Irianto Lambrie MM. Pada tanggal 22 Juni 2013 Pj Gubernur Kalimantan Utara melantik secara resmi sekitar 200 PNS Pejabat Eselon II, III dan IV yang berasal dari Pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Provinsi lain.

OPD tersebut meliputi Sekretariat Daerah yang terdiri dari Asisten I, II dan III dengan 7 Biro. Untuk Dinas ada 8 (delapan) dan Lembaga Teknis/Badan sebanyak 4 (empat). Sementara untuk SEKDA Provinsi ditunjuk Asisten III sebagai Plt-nya yaitu Drs H Badrun M.Si.

Wilayah Kalimantan Utara dibagi menjadi lima (5) wilayah Administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung. Daerah ini memiliki perbatasan sepanjang 2.004 kilometer yang selama ini tidak terpantau Pemerintah Provinsi Kaltim. Perbatasan darat Kaltara sangat potensial untuk pengembangan Perkebunan, dan perbatasan laut dapat menjadi tempat beroperasi Armada Kapal Ikan, sekaligus menjaga kedaulatan di kawasan Ambalat, sebagaimana Malaysia membangun ekowisata di Sipadan dan Ligitan untuk membuktikan pertuanan atas wilayah tersebut. Wilayah terluar perairan Kaltara mencakup Pulau Sebatik, Mercusuar Karang Unarang di Ambalat, Pulau Maratua, Pulau Sambit, dan Pulau Lingian.

Suku Bangsa terdiri dari Suku Bulungan, Suku Tidung, Suku Dayak dan Suku Banjar. Sementara untuk Agama meliputi agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu. Sedangkan Bahasa yang digunakan antara lain, Bahasa Indonesia, Bahasa Bulungan, Bahasa Tidung, Bahasa Dayak dan Bahasa Banjar. Rumah adat yang merupakan ciri khas di Provinsi Kalimantan Utara adalah Rumah Adat Baloy. Sedangkan senjata khas adalah Mandau.

Jumlah kecamatan yang ada di seluruh Provinsi Kalimantan Utara adalah sekitar 47 (empat puluh tujuh) kecamatan. Jumlah populasi setiap daerah/wilayah administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Jumlah Populasi Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara**

| No. | Kabupaten/Kota        | Populasi | Ibukota       |
|-----|-----------------------|----------|---------------|
| 1.  | Kota Tarakan          | 239.973  | Tarakan       |
| 2.  | Kabupaten Nunukan     | 140.567  | Nunukan       |
| 3.  | Kabupaten Bulungan    | 226.322  | Tanjung Selor |
| 4.  | Kabupaten Malinau     | 62.460   | Malinau       |
| 5.  | Kabupaten Tana Tidung | 22.841   | Tideng Pale   |

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, secara keseluruhan jumlah penduduk provinsi Kalimantan Utara adalah mencapai 738.163 jiwa dengan kepadatan 10/km<sup>2</sup> (26/sq mi) dan luas wilayah provinsi Kalimantan Utara mencapai 72.567.49 km<sup>2</sup> (28,018.46 mil<sup>2</sup>)

#### **1. Kondisi Topografi**

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakteristik fisik mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan air laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi di suatu daerah. Hampir setengah dari total luasan wilayah provinsi ini memiliki kelas ketinggian antara 500-1.000 m di atas permukaan laut (38,77%), hanya sekitar 5,92% yang memiliki kelas ketinggian 0-7 m di atas permukaan laut. Perkembangan pembangunan diperkirakan akan mengelompok di wilayah yang memiliki ketinggian relatif lebih landai, sedangkan wilayah pegunungan di Provinsi Kalimantan Utara dapat dijadikan kawasan lindung dan recharge area (daerah resapan air). Sebagian besar wilayah Kabupaten Bulungan berada pada ketinggian 100-500 m di atas permukaan laut (31,61%). Kabupaten Malinau dan Nunukan didominasi oleh

wilayah yang berada di kelas ketinggian 500-1.000 m di atas permukaan laut, yaitu masing-masing 58,46% dan 24,12%. Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 7-25 m di atas permukaan laut dan hanya sebagian kecil yang memiliki ketinggian 100-500 m di atas permukaan laut (0,01%). Kota Tarakan didominasi oleh kelas ketinggian 7-25 m di atas permukaan laut (72,41%), sementara sisanya (27,59%) berada pada ketinggian 0-7 m di atas permukaan laut (Kalimantan Utara Dalam Angka, *bps.go.id*, diakses pada September 2018).

## 2. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi Provinsi Kalimantan Utara hampir sama dengan wilayah lain di Indonesia yaitu beriklim tropis, terlebih letak provinsi ini berada di utara lintang 0°. Suhu udara maksimal terjadi pada bulan April dan Agustus dengan 34°C dan minimal terjadi pada bulan Januari, Februari, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember yaitu 24°C. Kondisi rata-rata kelembapan udara tahun 2016 di provinsi ini mencapai angka 83,75 % serta memiliki tekanan udara rata-rata 1.009,83 Mbs. Untuk keadaan kecepatan angin terdapat dalam *range* yang tidak terlalu fluktuatif, yaitu 4,16 knot. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September dengan 510,1 mm<sup>3</sup>, sedangkan paling rendah terjadi pada bulan April dengan 98,5 mm<sup>3</sup>. Rata-rata penyinaran matahari 55,75 % (Kalimantan Utara dalam Angka, *bps.go.id*, diakses pada September 2018).

## 3. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi wilayah Provinsi Kalimantan Utara dapat berupa air permukaan dan air bawah permukaan (air tanah). Air permukaan tercermin sebagai aliran sungai yang terbagi menjadi beberapa DAS (Daerah Aliran Sungai), mata air, dan air tanah. Kawasan resapan air terletak di daerah pegunungan dan perbukitan yang terletak di bagian barat, diantaranya terdapat di Kabupaten Malinau, Kabupaten

Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan, sedangkan kawasan tangkapan air terletak di bagian timur yang berupa dataran aluvial dan dataran fluvial. Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi Sumber Daya Air (SDA) yang sangat besar. SDA tersebut terdiri dari jumlah curah hujan di Kalimantan Utara yang cukup tinggi, sungai-sungai besar, mata air yang banyak, dan rawa yang luas. Potensi yang besar tersebut banyak dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan dan membantu kehidupan masyarakat Kalimantan Utara. Namun, karena peran SDA sangat besar tersebut juga membuat potensi daya rusak dan pencemaran sangat mungkin meningkat. Sungai merupakan bagian penting dari DAS, sangat berperan penting bagi kehidupan dan aktivitas masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Sungai-sungai yang ada di wilayah ini antara lain adalah Sungai Kayan, Sungai Sesayap, Sungai Pimping, Sungai Bandan, Sungai Sekatak, Sungai Jelarai, Sungai Linuang Kayan, Sungai Betayau, Sungai Sembakung, Sungai mandul, Sungai Semandak, Sungai Mintut, Sungai Manguli. Sungai tersebut merupakan media transportasi air bagi masyarakat. Selain itu, sungai tersebut juga sebagai sumber mata pencaharian nelayan tradisional di wilayah ini.

Berdasarkan hasil inventarisasi jumlah sungai dalam dokumen SLHD tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Utara memiliki 123 sungai dengan sungai terpanjang yaitu Sungai Pamusian dengan panjang 20.178 km, sungai terpendek yaitu Sungai Bebakin yang hanya memiliki panjang 1 Km. Untuk kategori sungai terlebar, Sungai Kayan menjadi yang utama dengan lebarnya yang mencapai 550 km. Sementara Sungai Bebakil menjadi sungai tersempit karena hanya memiliki lebar 2 m. Walaupun bukan sungai yang terpanjang ataupun terlebar di Kalimantan Utara, Sungai Naha Aya memiliki debit maksimum yaitu 1.992,52 m<sup>3</sup>/detik. Kalimantan Utara hanya memiliki 1 danau yaitu Danau Kelaputan Mangkupadi yang

terletak di Kabupaten Bulungan seluas 6 ha. Sementara untuk waduk dan embung semakin bertambah. Pada 2014, Kalimantan Utara memiliki 24 buah waduk dan 10 embung, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya terdapat 9 buah waduk dan 11 embung. Sedangkan situ tidak terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Waduk yang terluas dan volume paling besar di Provinsi Kalimantan Kalimantan Utara yaitu Waduk Irigasi Binusan di Kabupaten Nunukan dengan luas 3,6 ha dan volume 3000 m<sup>3</sup>. Sementara itu, Embung Air Baku Bolong di Kabupaten Nunukan menjadi embung terluas dan memiliki volume terbesar di provinsi ini. Luas embung tersebut yaitu 13,44 ha dengan volume 294.500 m<sup>3</sup>.

#### 4. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumberdaya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Penduduk berperan sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Jika dilihat secara umum, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2012 sampai 2017 selalu mengalami

peningkatan, dengan total jumlah penduduk 691.058 jiwa tahun 2017. Jumlah penduduk terbanyak di Kota Tarakan (253.026 jiwa tahun 2017), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Tana Tidung (25.084 jiwa tahun 2017) (Kalimantan Utara Dalam Angka, *bps.go.id*, diakses pada September 2018).

## **B. Gambaran Umum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Utara**

Dasar Hukum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Utara adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.23/2018 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Anggota tTim TPID Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas :

1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara
5. Kepala BPS Kalimantan Utara
6. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
7. Kapolda Provinsi Kalimantan Utara
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara
9. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara
10. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
12. Kepala Bagian Industri dan Jasa pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

13. Kepala Bagian Sarana Perekonomian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
14. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara
15. Kepala Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
16. Kepala Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
17. Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
18. Staf Pelaksana pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Utara

Peran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Utara dalam pengendalian inflasi daerah adalah merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis di bidang Sarana Perekonomian, Industri dan Jasa, serta Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam. Dengan fungsi Biro Perekonomian adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perekonomian sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan usaha, BUMD dan lembaga keuangan, sumber daya alam dan tata usaha biro;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang investasi, potensi daerah dan penanaman modal, pengembangan pariwisata, seni dan budaya serta pemasaran dan ekonomi kreatif;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan darat;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan udara dan kereta api;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan laut dan ASDP;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
6. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu instansi yang terlibat dalam pengendalian inflasi daerah. Dinas Pertanian dan ketahanan pangan menangani 2 (dua) urusan yakni urusan pertanian dan urusan pangan. Melalui media ini diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui jaringan internet dan diharapkan

mampu juga memberikan manfaat kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pertanian.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan bidang pangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana pertanian;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis prasarana pertanian;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perizinan usaha pertanian;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian;

8. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penyelenggaraan ketahanan pangan; perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis keamanan pangan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
11. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 79 dan 80 Paragraf 2 dan 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Perindustrian;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan Industri;

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sistem Informasi Industri;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sarana Distribusi Perdagangan;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Ekspor;
9. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
11. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis
12. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bank Indonesia memiliki visi yaitu menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Dari visi di atas, maka misi Bank Indonesia adalah

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber

pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang.

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia merupakan nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas: *Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork*.

Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara beralamat di Jl. Mulawarman No.123, Karang Anyar Pantai, Tarakan Bar., Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia.

### **C. Hasil Penelitian Evaluasi Kinerja TPID dalam rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara**

Inflasi Kalimantan Utara pada triwulan II 2018 tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi Kalimantan Utara pada triwulan II 2018 tercatat 3,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,18% (yoy). Secara spasial di wilayah Kalimantan, inflasi Kalimantan Utara pada triwulan II lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi keseluruhan Kalimantan dan merupakan provinsi dengan angka inflasi paling tinggi di Kalimantan setelah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pernyataan

di atas didasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua TPID sebagai berikut, “Pada triwulan II ini Kaltara memiliki tingkat inflasi yang paling tinggi di Kalimantan....”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 September 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3). Tingginya tingkat inflasi di Kalimantan Utara ini dilihat dari berbagai aspek seperti IHK umum, bahan makanan, makanan dan minuman, rokok dan tembakau, perumahan, listrik, gas dan BBM, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olahraga, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Untuk lebih lanjut mengenai inflasi di Kalimantan Utara dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2. Perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Utara Sepanjang Tahun 2016 – 2018

| No. | Aspek                                      | 2016 |      |       |       | 2017 |      |      |      | 2018 |      |
|-----|--------------------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
|     |                                            | I    | II   | III   | IV    | I    | II   | III  | IV   | I    | II   |
| 1.  | IHK Umum                                   | 4,71 | 6,16 | 4,56  | 4,31  | 4,34 | 4,39 | 3,61 | 2,77 | 2,18 | 3,02 |
| 2.  | Bahan Makanan                              | 8,46 | 8,49 | 7,20  | 6,25  | 5,07 | 7,46 | 5,36 | 2,25 | 2,57 | 3,72 |
| 3.  | Makanan & Minuman, Rokok dan Tembakau      | 5,76 | 8,79 | 8,65  | 8,50  | 6,99 | 3,56 | 4,04 | 2,71 | 2,65 | 2,57 |
| 4.  | Perumahan, air, listrik, gas dan BBM       | 2,18 | 2,94 | 2,03  | 1,66  | 2,03 | 2,94 | 2,97 | 2,98 | 2,57 | 1,75 |
| 5.  | Sandang                                    | 6,14 | 9,39 | 9,00  | 6,91  | 6,29 | 2,76 | 1,94 | 2,45 | 3,16 | 2,83 |
| 6.  | Kesehatan                                  | 8,61 | 9,13 | 8,00  | 9,40  | 6,62 | 5,71 | 6,00 | 3,27 | 2,09 | 1,45 |
| 7.  | Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga          | 4,15 | 4,30 | 2,49  | 2,36  | 1,86 | 2,13 | 0,57 | 0,62 | 0,49 | 0,11 |
| 8.  | Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan | 0,11 | 3,74 | -2,26 | -1,13 | 3,75 | 3,64 | 1,97 | 4,26 | 0,21 | 6,51 |

Sumber : Laporan Bank Indonesia, 2018

Dari Tabel 4.2 di atas, Inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan merupakan kelompok dengan inflasi dengan peningkatan tertinggi diikuti oleh kelompok bahan makanan. Secara umum, inflasi di seluruh kelompok tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir yang mencerminkan semakin terjaganya inflasi Kaltara (*Error! Reference source not found dan Error! Reference source not und.*).

Adapun inflasi transpor, komunikasi dan jasa keuangan berada di atas rata-rata tiga tahunnya sehingga perlu menjadi perhatian lebih. Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan Pada triwulan II 2018, inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan tercatat 5,98% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,24% (yoy). Adapun komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah angkutan udara yang memberikan andil inflasi sebesar 0,79% (yoy) akibat dari adanya kenaikan tarif angkutan udara pada periode berjalan sebagai dampak masuknya momen Lebaran. Data tabel di atas juga diperkuat dengan pernyataan salah satu informan ND sebagai berikut *“Inflasi di Kaltara setahu saya dipengaruhi oleh transport, komunikasi dan jasa keuangan ya. Ya mungkin karena provinsi ini baru, belum ada dukungan sarana dan prasarana disisi transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Masih susah untuk mendapatkan semuanya” ....*”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 September 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3).

Angka inflasi di Kalimantan Utara perlu penanganan yang cepat. Kebijakan pengendalian inflasi di Kalimantan Utara adalah sebagai berikut. *Pertama*, meningkatkan suplai bahan pangan. Meningkatkan suplai bahan pangan dapat dilakukan dengan lebih memberikan perhatian pada pembangunan di sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian pangan. Modernisasi teknologi dan metode pengolahan lahan, serta penambahan luas lahan pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan laju produksi bahan pangan agar tercipta swasembada pangan. *Kedua*, mengurangi defisit APBD. Mungkin dalam masa krisis ekonomi mengurangi defisit APBD tidak dapat dilaksanakan, tapi dalam jangka panjang (setelah krisis berlalu) perlu dilakukan. Nah, untuk mengurangi defisit anggaran belanja, pemerintah harus dapat meningkatkan penerimaan rutin, terutama dari sektor pajak. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh SH sebagai berikut *“ untuk mengendalikan inflasi diusahakan dengan meningkatkan suplai pangan di Kalimantan utara dan*

*mengurangi defisit APBD....”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3).*

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian mengenai evaluasi kinerja TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Utara.

### **1. Proses Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Utara**

Proses pembentukan TPID Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tertanggal 2 April 2013 tentang “Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, yang meminta seluruh kepala daerah untuk membentuk TPID. TPID memiliki peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Berbagai rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan TPID dinilai sedikit banyak telah membantu pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian harga.

Keanggotaan TPID Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas berbagai instansi pemerintah daerah seperti Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Utara, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Biro Perekonomian, Bapak Us sebagai berikut :

*“Keanggotaan TPID Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas berbagai instansi pemerintah daerah seperti Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Utara, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya”*  
(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa TPID Provinsi Kalimantan Utara beranggotakan beberapa Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pengendalian

*mengurangi defisit APBD....”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3).*

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian mengenai evaluasi kinerja TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Utara.

### **1. Proses Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Utara**

Proses pembentukan TPID Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tertanggal 2 April 2013 tentang “Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, yang meminta seluruh kepala daerah untuk membentuk TPID. TPID memiliki peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Berbagai rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan TPID dinilai sedikit banyak telah membantu pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian harga.

Keanggotaan TPID Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas berbagai instansi pemerintah daerah seperti Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Utara, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Biro Perekonomian, Bapak Us sebagai berikut :

*“Keanggotaan TPID Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas berbagai instansi pemerintah daerah seperti Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Utara, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3).*

Wawancara di atas menunjukkan bahwa TPID Provinsi Kalimantan Utara beranggotakan beberapa Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pengendalian

*pada akhirnya membumikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3).*

Dari penjelasan di atas, maka TPID memiliki tugas yaitu melakukan evaluasi, pemantauan, dan pengendalian terhadap sumber dan potensi tekanan inflasi daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong sasaran inflasi nasional kepada pemerintah pusat dan Bank Indonesia. Dengan ruang lingkup tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah mencakup pengendalian harga terhadap beberapa komoditas yang termasuk dalam bahan kebutuhan pokok masyarakat dan beberapa komoditas penting lainnya yang memiliki bobot dominan dalam sub kelompok barang/jasa.

Berdasarkan dari aspek prosesnya, maka dapat dibagi menjadi 4 (empat) aspek proses yaitu sebagai berikut :

a. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan TPID Provinsi Kalimantan Utara untuk mengenali kebutuhan masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi. Cara mengenali kebutuhan ini diwujudkan dengan mengidentifikasi laju pertumbuhan ekonomi, menyusun agenda dan prioritas pengendalian inflasi daerah yang tepat. Program-program disusun berdasarkan analisa kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Us sebagai berikut *“responsibilitas TPID dapat diukur dari cara TPID mengenali kebutuhan masyarakat. Cara mengenali kebutuhan masyarakat yaitu dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi, menyusun beberapa agenda penyelesaian masalah dan skala prioritas atas penyelesaian masalah tersebut”* (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 November 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3).

Cara TPID Provinsi Kalimantan Utara mengenali kebutuhan masyarakat adalah dengan mengidentifikasi laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dari

waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan II 2018 tercatat 4,6% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,6% (yoy). Meskipun pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara melambat, namun secara spasial pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara masih berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi se-Kalimantan yang tumbuh sebesar 3,3% (yoy). Sementara itu, capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara tersebut berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,3% (yoy) pada triwulan II 2018. Dari angka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara di atas, TPID memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menarik beberapa investor. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ND sebagai berikut *“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berusaha menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri, memperbaiki pelayanan perizinan dan memperbaiki harga pasar”* (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 November 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3).

TPID Provinsi Kalimantan Utara selama ini juga menyusun beberapa agenda yang akan dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi. TPID Provinsi Kalimantan Utara menyusun beberapa prioritas kegiatan untuk mengendalikan inflasi daerah. Agenda dan prioritas kegiatan ini telah dilakukan secara terprogram. Namun, program tersebut belum lah sepenuhnya mampu menggambarkan kebutuhan masyarakat. Penjelasan di atas didasarkan pada pernyataan ND sebagai berikut, *“Kami menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Jadwal itu pun atas persetujuan Bapak Sekda dan Gubernur”* (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 November 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dilihat dari aspek Responsivitasnya, TPID Provinsi Kalimantan Utara telah mampu menyusun agenda dan prioritas dalam pengendalian inflasi daerah. Namun, program tersebut belum mampu sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat.

b. Pemrosesan informasi

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait dan bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda, atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang.

Sebagai pendahuluan, penulis menginformasikan mengenai perkembangan inflasi Kalimantan Utara sebagai berikut. Secara tahunan, inflasi Kaltara triwulan II 2018 mengalami peningkatan dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Inflasi tahunan Kalimantan Utara triwulan II 2018 tercatat 3,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,18% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi tahunan Kalimantan Utara triwulan II 2018 terutama disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan serta kelompok bahan makanan. Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami inflasi tertinggi, sedangkan kelompok bahan makanan mengalami inflasi. Sementara itu, kelompok lainnya mengalami penurunan dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya.

Tarif angkutan udara menjadi komoditas utama penyumbang inflasi Kaltara pada triwulan II 2018. Angkutan udara tercatat menyumbang andil inflasi

sebesar 1,58% (yoy). Tingginya andil inflasi komoditas tersebut disebabkan meningkat tajamnya permintaan tiket mudik menjelang momen Lebaran. Komoditas lainnya yang turut menyumbang inflasi adalah daging ayam ras yang mengalami kenaikan harga akibat permintaan pasar yang tinggi dan adanya permainan harga dari oknum-oknum penjual eceran. Di sisi lain, komoditas bawang merah menjadi komoditas dengan andil deflasi tertinggi pada triwulan II 2018 sebesar -0,04% (yoy) disebabkan adanya kenaikan pasokan sehubungan dengan panen raya di daerah sentra produksi.

Tabel 4.3. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kalimantan Utara  
Triwulan 2018 (yoy)

| Andil Inflasi   |       |       | Andil Deflasi     |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|
| Komoditas       | yoy   | Andil | Komoditas         | yoy   | andil |
| Angkutan udara  | 58,34 | 1,58  | Bawang Merah      | -2,38 | -0,04 |
| Bandeng/Bolu    | 10,78 | 0,22  | Bawang Putih      | -3,03 | -0,02 |
| Daging Ayam Ras | 20,86 | 0,19  | Air Kemasan       | -1,21 | -0,02 |
| Layang/Benggol  | 8,76  | 0,13  | Cakalang/Sisik    | -6,35 | -0,01 |
| Kangkung        | 32,27 | 0,12  | Apel              | -1,62 | -0,01 |
| Ketimun         | 36,62 | 0,06  | Pasta Gigi        | -2,16 | -0,01 |
| Daging Sapi     | 8,78  | 0,05  | Emas Perhisan     | -1,16 | 0,00  |
| Wortel          | 23,11 | 0,04  | Kerang            | -3,49 | 0,00  |
| Sawi Hijau      | 27,07 | 0,03  | Susu Kental Manis | -0,98 | 0,00  |
| Bayam           | 12,54 | 0,03  | Kentang           | -0,78 | 0,00  |

Sumber Data : Laporan Bank Indonesia, 2018

Komoditas utama penyumbang inflasi selain kelompok di atas disebabkan pula oleh kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan. Komoditas utama ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini.

**Tabel 4.4. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Transport,  
Komunikasi dan Jasa Keuangan Kaltara Triwulan II 2018  
(yoy)**

| <b>Komoditas</b>         | <b>Inflasi</b> | <b>Andil</b> | <b>Komoditas</b> | <b>Deflasi</b> | <b>Andil</b> |
|--------------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| Angkutan Udara           | 22,33          | 0,79'        | Angkutan Laut    | -4,21          | -0,01        |
| Bahan Bakar Rumah Tangga | -              | -            | -                | -              | -            |
| Bensin                   | -              | -            | -                | -              | -            |
| Rokok Kretek Filter      | -              | -            | -                | -              | -            |
| Rokok Kretek             | -              | -            | -                | -              | -            |
| Rokok Putih              | -              | -            | -                | -              | -            |
| Tarif Parkir             | -              | -            | -                | -              | -            |
| Solar                    | -              | -            | -                | -              | -            |
| Angkutan Sungai          | -              | -            | -                | -              | -            |
| Tarif Air Minum PAM      | -              | -            | -                | -              | -            |

*Sumber : Laporan Bank Indonesia, 2018*

Inflasi di Kalimantan Utara juga disebabkan oleh adanya inflasi dari kelompok bahan makanan. Inflasi kelompok bahan makanan triwulan II 2018 tercatat 3,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,52% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan disebabkan adanya kenaikan permintaan memasuki momen Lebaran. Komoditas ikan bandeng memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,48% (yoy) disebabkan naiknya permintaan atas komoditas tersebut. Peningkatan harga ikan bandeng di Kaltara tersebut terkonfirmasi dari pergerakan harga dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang dipublikasikan Bank Indonesia melalui website [www.bargapangan.id](http://www.bargapangan.id). Di sisi lain, bawang putih dan ikan layang memberikan andil deflasi tertinggi masing-masing sebesar -0,23% (yoy) dan 0,15% (yoy). Kembali normalnya pasokan paska berakhirnya musim hujan di Kaltara menjadi penyebab

peningkatan pasokan komoditas bawang putih di Kaltara selama triwulan II 2018.

Singkatnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Bahan Makanan Kaltara Triwulan II 2018 (yoy)

| Komoditas       | Inflasi | Andil | Komoditas       | Deflasi | andil |
|-----------------|---------|-------|-----------------|---------|-------|
| Bandeng/Bolu    | 27,15   | 0,48  | Bawang Putih    | -24,91  | -0,23 |
| Bawang Merah    | 22,15   | 0,28  | Layang/Benggol  | -8,62   | -0,15 |
| Beras           | 5,27    | 0,23  | Cabai Rawit     | -11,09  | -0,09 |
| Daging Ayam Ras | 10,63   | 0,11  | Tomat Sayur     | -17,48  | -0,05 |
| Telur Ayam Ras  | 10,19   | 0,08  | Pepaya          | -27,48  | -0,03 |
| Bawal           | 14,61   | 0,05  | Buncis          | -37,08  | -0,03 |
| Cabai Merah     | 32,17   | 0,05  | Kol Putih/Kubis | -20,12  | -0,03 |
| Kangkung        | 10,80   | 0,05  | Terong Panjang  | -9,35   | -0,01 |
| Daging Sapi     | 6,70    | 0,04  | Semangka        | -7,01   | -0,01 |
| Pisang          | 9,97    | 0,03  | Minyak Goreng   | -1,60   | -0,01 |

Sumber : Laporan Bank Indonesia, 2018

Inflasi kelompok selain bahan makanan serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan tercatat sebesar 1,73% (yoy) pada triwulan II 2018, relatif meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,69% (yoy) (*Error! Reference source not found.*). Naiknya tekanan inflasi kelompok inti didorong oleh komoditas batu bata yang memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,23% (yoy). Peningkatan harga batu bata tersebut disebabkan oleh masuknya musim penghujan sehingga produksi batu bata mengalami penurunan. Selain itu, komoditas labu manis dan gula pasir memberikan andil deflasi masing-masing sebesar -0,06% dan -0,03% (yoy). Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan permintaan pada komoditas tersebut sehingga terjadi kenaikan pasokan. Singkatnya dapat dilihat pada Tabel 4.6. di bawah ini.

**Tabel 4.6. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Lainnya**  
**Kaltara Triwulan II (2018)**

| Komoditas           | Inflasi | Andil | Komoditas             | Deflasi | andil |
|---------------------|---------|-------|-----------------------|---------|-------|
| Batu Bata/Batu Tala | 26,32   | 0,23  | Labu                  | -29,21  | -0,06 |
| Nasi dengan Lauk    | 5,57    | 0,09  | Parang/Manis/Merah    |         |       |
| Upah Pembantu RT    | 11,34   | 0,07  | Gula Pasir            | -3,62   | -0,03 |
| Es                  | 8,00    | 0,05  | Susu Rendah Lemak     | -20,84  | -0,02 |
| Mie                 | 3,84    | 0,04  | Air Kemasan           | -0,99   | -0,01 |
| Ikan Bakar          | 16,31   | 0,04  | Sabun Detergen        | -3,10   | -0,01 |
| Besi Beton          | 12,65   | 0,04  | Bubuk/Cair            |         |       |
| Sate                | 8,38    | 0,03  | Lada/Merica           | -27,20  | -0,01 |
| Baju Muslim W       | 7,75    | 0,03  | Pasta gigi            | -2,92   | -0,01 |
| Donat               | 4,89    | 0,03  | Kopi Bubuk            | -2,19   | -0,01 |
|                     |         |       | Pare                  | -12,98  | -0,01 |
|                     |         |       | Baju kaos tanpa kerah | -9,10   | -0,01 |

*Sumber : Laporan Bank Indonesia, 2018*

Inflasi juga dilihat dari Inflasi Bulanan (mtm). Rata-rata inflasi bulanan Kaltara triwulan II 2018 lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Rata-rata inflasi bulanan Kalimantan Utara triwulan II 2018 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,17% (mtm), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 tercatat inflasi sebesar 0,89% (mtm). Peningkatan rata-rata inflasi bulanan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini

**Tabel 4.7. Perbandingan Inflasi Kalimantan Utara Triwulan II 2017 dan Triwulan II 2018 (mtm)**

| Kelompok Barang                         | Triwulan II 2017 |      |       |           | Triwulan II 2018 |       |       |           |
|-----------------------------------------|------------------|------|-------|-----------|------------------|-------|-------|-----------|
|                                         | Apr              | Mei  | Jun   | Rata-rata | Apr              | Mei   | Jun   | Rata-rata |
| Umum / Total                            | 0,27             | 0,51 | 1,89  | 0,89      | 0,29             | 0,50  | 2,71  | 1,17      |
| Bahan Makanan                           | -0,05            | 1,17 | 2,49  | 1,20      | 1,16             | -0,28 | 3,88  | 1,59      |
| Makanan dan minuman, rokok dan tembakau | 0,62             | 0,24 | -0,01 | 0,28      | 0,04             | 0,56  | 0,17  | 0,25      |
| Perumahan, air, listrik, gas dan BB     | 0,40             | 0,21 | 1,23  | 0,61      | 0,08             | 0,91  | 0,03  | 0,34      |
| Sandang                                 | 0,34             | 0,60 | 0,41  | 0,45      | -0,25            | -0,01 | 1,28  | 0,34      |
| Kesehatan                               | 0,11             | 0,26 | 0,32  | 0,23      | 0,00             | 0,16  | -0,11 | 0,02      |
| Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga       | 0,32             | 0,10 | 0,00  | 0,14      | 0,00             | 0,05  | 0,00  | 0,02      |
| Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan  | 0,17             | 0,37 | 6,63  | 2,39      | -0,24            | 1,67  | 12,36 | 4,59      |

*Sumber : Laporan Bank Indonesia, 2018*

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, Inflasi Kalimantan Utara tercatat sebesar 0,29% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -0,03% (mtm). Inflasi Kalimantan Utara berada di bawah level inflasi Nasional sebesar 0,10% (mtm). Namun, pada triwulan II 2018 ini inflasi Kaltara disebabkan oleh naiknya harga pada kelompok bahan transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Kelompok bahan makanan tercatat mengalami inflasi 1,16% (mtm), meningkat dibandingkan periode bulan sebelumnya sebesar 0,25% (mtm). Inflasi pada kelompok sandang tercatat sebesar -0,25% (mtm) lebih rendah dibandingkan periode bulan sebelumnya yang tercatat 1,34% (mtm). Inflasi IHK Kaltara Mei 2018 tetap terkendali serta berada dalam tingkat kisaran sasaran inflasi tahun 2018. Kalimantan Utara tercatat mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,29% (mtm). Inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar tercatat sebesar 0,91% (mtm) lebih tinggi dibandingkan periode bulan sebelumnya yang tercatat 0,08% (mtm). Kenaikan harga batu bata disinyalir dampak dari kenaikan permintaan sejalan dengan tren meningkatnya kegiatan pembangunan di Tarakan. Komoditas lainnya yang menyumbang andil inflasi yaitu nasi dengan lauk dan donat dengan sumbangan sebesar 0,06% dan 0,03% (mtm). Kelompok bahan makanan tercatat mengalami deflasi -0,29% (mtm), turun dibandingkan periode bulan sebelumnya sebesar 1,16% (mtm).

Berdasarkan informasi mengenai inflasi tahunan dan bulanan yang terjadi di Kalimantan Utara di atas, maka TPID bertugas memproses informasi-informasi tersebut dalam rangka melakukan pengendalian inflasi di Kalimantan Utara. Hal ini didasarkan pada pernyataan SH yaitu *“TPID itu selalu memproses setiap informasi inflasi yang ada, informasi ini biasanya berasal dari masyarakat, dari*

*Badan Statistik, serta Koran. Semoga informasi itu diproses dan diolah kemudian ditarik kesimpulan permasalahannya dicarilah solusi”* (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 November 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)

Pengendalian inflasi diperlukan untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi. Penjelasan di atas sebagaimana diungkapkan oleh DS sebagai berikut *“Tugas TPID dalam pengendalian inflasi adalah menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi menjadi lancar dan aman”* (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 November 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3). Pernyataan tersebut diperkuat pula oleh US, *“dari informasi mengenai inflasi, TPID harus mampu memberikan solusi agar pasokan tetap tersedia, harga pasokan terjangkau, distribusi pasokan lancar dan komunikasi antar stakeholder pun lancar. Maka, inflasi pun menjadi terkendali”* (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 November 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)

Untuk menurunkan inflasi pada level yang rendah dan stabil perlu dukungan dari Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi gangguan (*shocks*) dari sisi penawaran (*supply*), termasuk terkait gejolak harga pangan dan harga yang diatur pemerintah. Dari data-data di atas diketahui bahwa sumber persistensi inflasi Provinsi Kalimantan Utara difokuskan pada sisi penawaran. Sumber-sumber persistensi inflasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara dilihat berdasarkan kelompok komoditi penyusun IHK yang terdiri dari komponen *volatile foods* dan *administered price*. Kelompok kesehatan dipilih untuk mewakili komponen *administered price* dikarenakan pada kelompok ini lebih didominasi oleh kebutuhan yang harganya ditentukan oleh pemerintah, seperti tariff BPJS Kesehatan dan BPS Ketenagakerjaan yang belakangan menjadi

program nasional ditambah dengan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan sangat penting menyebabkan komoditas kelompok kesehatan berada pada kelompok terbesar sumber persistensi inflasi Provinsi Kalimantan Utara. Disamping itu, Kelompok terbesar ketiga yaitu Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dipilih untuk mewakili komponen *administered price* dikarenakan pada kelompok ini lebih didominasi oleh kebutuhan yang harganya ditentukan oleh pemerintah, seperti tarif dasar listrik, bahan bakar dan air yang seringkali menyebabkan *shock* (guncangan) yang begitu dahsyat bagi Perekonomian daerah.

Kelompok bahan makanan merupakan komponen *volatile foods* karena pada kelompok ini terdiri dari bahan makanan seperti beras, daging, kacang-kacangan, buah-buahan, bawang dan lain sebagainya yang rentan terhadap guncangan seperti bencana alam dan gagal panen. *Volatile foods* merupakan kelompok bahan makanan yang rentan oleh adanya *shock* atau guncangan. *Shock* yang dimaksud dapat berupa gagal panen akibat bencana alam, kekeringan dan kehanjiran maupun faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik dan perkembangan harga komoditas pangan internasional. Tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Utara banyak di pengaruhi oleh adanya guncangan pada komponen *volatile foods*. Antar wilayah di Provinsi Kalimantan Utara juga saling melakukan kerjasama termasuk dalam melakukan perdagangan hasil pertanian.

Kebutuhan akan bahan pertanian di Provinsi Kalimantan Utara dipenuhi oleh pasokan dari daerah-daerah Provinsi Kalimantan Utara sendiri. Hal ini dikarenakan Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah penghasil pertanian seperti beras, gula, minyak goreng dan sayur, dan buah. Bahkan Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi penghasil beberapa komoditi pertanian di Indonesia, diantaranya komoditi di suh sektor tanaman

pangan, perkebunan, dan pertanian. Komoditi tanaman pangan yang terutama adalah padi (beras), sayur, dan buah.

Dari data-data di atas mengenai inflasi di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari pemrosesan informasi, TPID Provinsi Kalimantan Utara adalah telah memproses informasi mengenai perkembangan inflasi di Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya, dan setiap Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara pada khususnya dengan baik. TPID Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki dukungan data yang banyak, lengkap, dan valid baik dari BPS Kalimantan Timur maupun Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara. Namun, informasi yang diperoleh belum mampu membuat TPID Provinsi Kalimantan Utara membuat keputusan tepat dalam pengendalian inflasi daerah.

Selain itu, TPID mampu memproses setiap informasi yang diperoleh baik berasal dari masyarakat maupun dari BPS Kalimantan Timur dan Bank Indonesia dengan baik, namun TPID Provinsi Kalimantan Utara belum mampu memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik apabila terjadi gejolak perekonomian seperti tidak pernah melakukan telekonferensi terkait inflasi kepada masyarakat, memberikan informasi valid kepada masyarakat terkait pengendalian inflasi di Kalimantan Utara.

#### c. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Hasil wawancara terkait komunikasi TPID adalah sebagai berikut “*komunikasi TPID dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi TPID tingkat provinsi dua kali setahun*”, sebagaimana

diungkapkan oleh Bapak Us pada wawancara tanggal 3 Desember 2018 di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Utara. Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan SH sebagai berikut *“komunikasi ya melalui rapat koordinasi TPID. Di rapat itu ada TPID provinsi dan kabupaten, dikumpulkan untuk membahas permasalahan-permasalahan inflasi di daerah. Bank Indonesia juga diundang. Kegiatan seperti ini selalu dihadiri bapak gubernur”* (Wawancara pada tanggal 4 November 2018 pukul 13.00 di Ruang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara. Pernyataan ini juga diperkuat oleh pernyataan DS, *“TPID Provinsi Kalimantan Utara memiliki koordinasi secara intens dengan TPID kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan utara”*(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh TPID Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara. Pernyataan ini sebagaimana dikemukakan oleh Us *“Melakukan rapat koordinasi pada tingkat provinsi dengan mengundang kabupaten/kota”*(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3). Pendapat di atas juga diperkuat oleh pendapat SA sebagai berikut *“Iya, yaitu melalui rapat koordinasi tingkat provinsi dan monitoring yang dilakukan TPID provinsi ke kabupaten/kota”*(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)

TPID menyelenggarakan Rapat Koordinasi Provinsi TPID sebagai wadah pertemuan seluruh TPID se-Kalimantan Utara. Forum koordinasi juga diselenggarakan dalam lingkup antarwilayah melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), serta melalui Rapat Koordinasi Provinsi-Kabupaten/Kota. Berbagai forum koordinasi tersebut bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan pengendalian harga yang perlu menjadi prioritas untuk ditangani.

Pada dasarnya rapat koordinasi TPID yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah baik secara administrasi dan prosesnya. Namun dari sisi output apalagi outcome hasil pelaksanaan rapat koordinasi TPID belum terlihat nyata. Inflasi yang senyatanya diharapkan turun tetap masih meninggi seperti saat belum adanya rapat koordinasi. Oleh karena itu, berbagai forum yang ada mulai dari Rapat Koordinasi Daerah TPID dalam satu provinsi, maupun Rapat Koordinasi Wilayah TPID dalam rangka koordinasi TPID antarprovinsi, serta forum Rapat Koordinasi Nasional TPID perlu dioptimalkan. Berbagai program yang diinisiasi Pokjanas TPID perlu terus diperkuat. Dengan demikian, TPID akan mampu mengendalikan inflasi secara masif. Jika demikian, pada akhirnya Indonesia akan bisa keluar dari tekanan ekonomi dan masyarakat terutama kalangan bawah bisa hidup, setidaknya berkecukupan.

TPID terdiri dari berbagai instansi pemerintah daerah provinsi Kalimantan Utara. Dari berbagai instansi tersebut memiliki peran masing-masing disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap instansi tersebut. Setiap instansi yang ditunjuk menjadi TPID harus saling berkoordinasi satu sama lain demi menciptakan sebuah kebijakan publik di daerah tersebut menghasilkan kombinasi kebijakan yang terintegrasi, sehingga secara keseluruhan berdampak positif bagi terjaganya harga barang pokok bagi masyarakat. Koordinasi yang solid di antara berbagai penentu kebijakan publik di daerah tersebut menghasilkan kombinasi kebijakan yang terintegrasi, sehingga secara keseluruhan berdampak positif bagi terjaganya harga barang pokok bagi masyarakat. Peran setiap instansi/lembaga/dinas/SKPD di Provinsi Kalimantan Utara

*“Instansi/SKPD sesuai dengan fungsinya masing-masing. Inflasi inti ada pada perwakilan BI. Volatile food ada pada disperindagkop dan pertanian. Administered price ada pada SKPD terkait”*(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)

Dengan demikian, koordinasi yang dikembangkan melalui harmonisasi kebijakan dari atau ke level daerah diharapkan dapat lebih efektif, tidak hanya dalam menekan laju inflasi di daerah, tapi juga akan berlanjut pada pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil sebagaimana yang ingin dicapai bersama oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Karena itu, TPID perlu terus didorong dan dikembangkan menjadi lebih tersistem dan terintegrasi dari pusat hingga daerah. Sampai dengan bulan Juni tahun 2018, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka penguatan koordinasi serta rekomendasi di wilayah kerja TPID Kaltara (Tabel 4.8).

Tabel 4.8. Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Wilayah Kaltara Awal 2018 sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

| No. | Tanggal    | Kegiatan            | Hasil Kegiatan/Tindak Lanjut                                                                                                                                    | Pimpinan Kegiatan                                          |
|-----|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.  | April 2018 | Penandatanganan MoU | Penandatanganan Pakta Integritas Pengusaha/Distributor untuk menjaga kestabilan harga menjelang Ramadan di Kota Tarakan dan se Provinsi Kaltara                 | Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara |
| 2.  | Mei 2018   | Temu Media          | Sosialisasi bijak berbelanja selama Ramadan di Kota tarakan dan se Provinsi Kaltara                                                                             | Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara          |
| 3.  | Mei 2018   | Sidak Pasar         | Sepanjang bulan puasa melakukan sidak stok barang ke distributor utama di seluruh pasar utama di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kab. Nunukan dan Kab Malinau | Kepala Dinas Terkait                                       |
| 4.  | Juni 2018  | Sidak papsar        | Sepanjang bulan puasa menangkap penimbun barang di seluruh gudang distributor di Tarakan                                                                        | Satgas pangan                                              |
| 5.  | Juni 2018  | Sidak Pasar         | Melakukan sidak pasar terkait harga pangan pokok                                                                                                                | Kementerian Perdagangan                                    |
| 6.  | Juni 2018  | Penindakan          | Menindak langsung pelaku pasar yang menjual dagng ayam ras di atas HET di Psar Guser dan Tenguyun Kota Tarakan                                                  | Satgas pangan                                              |

|    |           |                  |                                                                                                                       |                                          |
|----|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. | Juli 2018 | Rapat Koordinasi | FGD dengan maskapai Sriwijaya, Garuda Indonesia dan Lion Air terkait tariff batas bawah dan batas atas angkutan udara | Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltara |
|----|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

*Sumber : Laporan Bank Indonesia, 2018*

Komunikasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi Kalimantan Utara adalah dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi di kabupaten/kota. Untuk mengatasi berbagai permasalahan inflasi koordinasi antara Pokjanas TPID dengan TPID, TPID dengan *stakeholder* terkait akan terus diperkuat. TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi secara intensif dalam rangka pengendalian inflasi Kalimantan Utara. TPID Provinsi Kalimantan Utara memiliki koordinasi secara intens dengan TPID kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan utara. Hal-hal yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mengendalikan inflasi daerah adalah dengan melakukan rapat koordinasi di tingkat provinsi.

## 2. Keluaran TPID Provinsi Kalimantan Utara

Untuk itu diperlukan langkah untuk memantau dan mengendalikan persistensi tersebut dan dalam hal mengambil kebijakan para pihak yang berwenang juga perlu memperhatikan *timing* yang tepat.

### a. Analisis Kritis

Analisis yang kritis (atau berpikir kritis) merupakan suatu cara untuk mencoba memahami kenyataan, kejadian (peristiwa), situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada di balik makna yang jelas atau makna langsung. Analisis kritis mempersyaratkan sikap untuk berani menantang apa yang dikatakan atau dikemukakan oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa, pemerintah dan lembaga. Analisis kritis mempertanyakan asumsi. Analisis kritis dapat digunakan untuk

menantang perilaku atau praktek yang dilakukan seseorang atau menganalisis pekerjaan sebuah serikat, atau gerakan sosial, atau untuk menantang dan melawan (*oppose*) kekuatan-kekuatan dominan di dalam komunitas dan masyarakat.

Analisis kritis merupakan suatu kapasitas, potensi yang dimiliki oleh semua orang. Kendati demikian, analisis kritis tetap akan tumpul dan tidak berkembang apabila tidak diasah (dipraktekkan). Selain itu, upaya untuk mempelajari cara pemakaian analisis kritis tidak pernah selesai. Analisis kritis merupakan upaya pribadi atau upaya kolektif. Analisis kritis menentukan kemungkinan suatu realitas baru, kesepakatan yang lebih baik (*better deal*), masyarakat yang lebih baik ke arah ‘langkah’ untuk memperbaiki kenyataan atau situasi yang tengah dianalisis. Selanjutnya, ‘situasi baru’ tersebut dapat dikaji dengan analisis kritis. Peranti terpenting untuk melaksanakan analisis kritis, yaitu “pertanyaan”. Meski demikian, analisis kritis bukanlah serangkaian langkah atau pertanyaan yang berangkat dari ketidaktahuan (*ignorance*) menuju ke pencerahan (*enlightenment*).

Ada sejumlah unsur penting yang dapat dipakai sebagai kerangka analisis kritis. Pertama, analisis kritis mensyaratkan pencarian fakta dan ciri situasi atau kenyataan yang dicoba-difahami. Kita bertanya dan mencari tahu: “Apa yang sebenarnya tengah berlangsung?”; “Apa akibat yang timbul dari situasi ini?”; “Apa dampak situasi atau kejadian atau pernyataan itu terhadap pihak lain?”; “Siapakah pihak yang diuntungkan oleh situasi atau usulan tersebut?”; “Siapakah yang dirugikan oleh situasi atau usulan tersebut?”; “Apa penyebab terjadinya situasi tersebut?”

Analisis kritis juga berusaha memahami “riwayat” pernyataan, situasi atau masalah yang perlu difahami. Analisis kritis mengkaji situasi atau peristiwa atau pernyataan yang tengah dalam proses perubahan. “Bagaimana situasi tersebut

dapat terjadi? Seberapa permanenkah situasinya? Apa cara yang mungkin dilakukan agar situasi tersebut berubah? Apa penyebab perubahan tersebut? Analisis kritis mengkaji situasi atau peristiwa dari sudut pandang yang utuh. Kontradiksi atau kebalikan dari sebuah situasi perlu dicari. Sehingga, ketika mengamati suatu-situasi baru atau sejumlah keadaan, muncul pertanyaan, “Apa yang terjadi dengan situasi lama, manakah yang tidak berubah? Apa yang terjadi dengan situasi positif / negatif?” Misalnya, “keadilan sosial” hanya dapat dipikirkan dan dicapai lewat pemahaman tentang “ketidak-adilan sosial ” dan penyebabnya.

Dari analisis kritis mengenai inflasi yang terjadi di Kalimantan Utara, maka diketahui bahwa inflasi di Kalimantan Utara triwulan II lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi keseluruhan Kalimantan dan merupakan provinsi dengan angka inflasi paling tinggi di Kalimantan setelah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Secara tahunan, inflasi kelompok bahan makanan lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya dari inflasi sebesar 2,52% (yoy) menjadi 3,78% (yoy). Setelah dilakukan analisis kritis terhadap inflasi dari kelompok bahan makanan diperoleh data bahwa inflasi kelompok bahan makanan (komoditas bumbu-bumbuan, ikan dan sayuran) disebabkan gangguan pasokan yang terjadi baik di Kaltara maupun di wilayah sentra produksi di luar Kaltara. Selain itu, karena adanya curah hujan yang tinggi dan belum dimulainya masa panennya bawang merah di sentra produksi menyebabkan tingginya level harga bawang merah bulan April 2018.

Secara tahunan, inflasi kelompok sandang tercatat 2,56% (yoy), relatif lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 3,16% (yoy). Setelah dilakukan

analisis kritis terhadap inflasi dari kelompok sandang karena adanya hari raya idul fitri. Secara tahunan, inflasi kelompok tersebut tercatat -0,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 0,21% (yoy). Tarif angkutan udara mengalami kenaikan sesuai pola historisnya pada bulan Ramadhan sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap mode transportasi udara. Secara tahunan, inflasi kelompok batu bata tercatat 2,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,25% (yoy).

Kebijakan yang telah disusun oleh TPID dalam rangka mengendalikan inflasi daerah *"Dalam proses pembuatan regulasi tentang HET"* ((Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)). Seberapa besar kontribusi adanya TPID Provinsi Kalimantan Utara terhadap pengendalian inflasi daerah. Penjelasan di atas sebagaimana diungkapkan oleh RS *"Secara kuantitatif belum ada pengukuran. Namun secara kualitatif tingkat inflasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sudah ditindaklanjuti oleh Tim TPID Provinsi"*. ((Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3). Pernyataan ini sebagaimana dikemukakan oleh Rs *"Membentuk tim pengendalian inflasi daerah dengan ketua pak gubernur"* (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari analisis kritisnya, TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun sebuah kebijakan pengendalian inflasi belum berdasarkan analisis secara kritis terhadap permasalahan-permasalahan inflasi yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara. Langkah-langkah yang ditetapkan masih sebatas formalitas dan seremonial seperti melakukan rapat koordinasi saja.

## b. Kesadaran Diri

Secara tahunan, inflasi Kaltara triwulan II 2018 mengalami peningkatan dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Inflasi tahunan Kaltara triwulan II 2018 tercatat 3,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,18% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi tahunan Kaltara triwulan II 2018 terutama disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan serta kelompok bahan makanan. Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami inflasi tertinggi, sedangkan kelompok bahan makanan mengalami inflasi. Sementara itu, kelompok lainnya mengalami penurunan dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya.

Berdasarkan kelompok pengeluarannya, meningkatnya tekanan inflasi pada hampir seluruh menjadi penyebab naiknya inflasi Kaltara triwulan II 2018. Inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan merupakan kelompok dengan inflasi dengan peningkatan tertinggi diikuti oleh kelompok bahan makanan. Adapun inflasi transpor, komunikasi dan jasa keuangan berada di atas rata-rata tiga tahunnya sehingga perlu menjadi perhatian lebih. Adapun komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah angkutan udara yang memberikan andil inflasi sebesar 0,79% (yoy) akibat dari adanya kenaikan tarif angkutan udara pada periode berjalan sebagai dampak masuknya momen Lebaran. Disamping itu, komoditas yang menyumbang andil inflasi cukup tinggi adalah bahan bakar rumah tangga sebesar 0,10% (yoy). Disisi lain, terdapat komoditas yang menyumbang andil deflasi yaitu angkutan laut dengan andil sebesar -0,01%(yoy).

Sejak dibentuk tahun 2008, TPID Provinsi Kalimantan Utara telah berperan cukup baik dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Utara, hali ini ditandai dengan inflasi Provinsi Kalimantan Utara secara rata – rata pasca

pembentukan TPID Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008 cukup stabil di level  $\pm$  6%, meskipun masih tergolong tinggi tetapi TPID cukup memberikan kontribusi yang besar dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Utara. TPID Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki dasar hukum pembentukan dan pengelolannya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 027/1969/SJ tanggal 2 April 2013 tentang “Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah”. Hal ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga di Kalimantan Utara.

Kendala TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan pengendalian inflasi daerah adalah *“Ada beberapa komoditi yang supply tergantung luar daerah yang menyebabkan inflasi tinggi”*. Solusi yang dilakukan adalah *“Antisipasi dengan memenuhi stok supply bekerja sama dengan dinas teknis terkait”*. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)

Manfaat positif yang dapat diperoleh dengan terciptanya stabilitas harga di daerah diantaranya yaitu: (1) terjaganya daya beli sehingga dapat mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah. (2) Terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan usaha khususnya investasi sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Berdasarkan analisis kriti karakteristik inflasi di Provinsi Kalimantan Utara dipengaruhi oleh kejutan di sisi penawaran (*supply shock*) yang bersifat struktural, seperti halnya: (1) Pasokan barang yang terbatas. Pada komoditas pertanian, terganggunya pasokan umumnya disebabkan oleh kondisi cuaca yang

tidak kondusif bagi kuantitas dan kualitas produksi pangan (misalnya curah hujan yang berlebihan, musim kemarau yang berkepanjangan, dan gangguan hama). (2) Distribusi barang yang tidak lancar khususnya komoditas pertanian dari pusat produksi ke daerah pemasaran. Gangguan distribusi antara lain karena kendala infrastruktur transportasi, seperti: jalan rusak, dan lain-lain. (3) Kondisi infrastruktur yang kurang mendukung, baik dalam rangka proses produksi, distribusi, termasuk infrastruktur terkait energi. (4) Struktur pasar dan mekanisme pembentukan harga yang kurang kompetitif khususnya pada beberapa komoditas pangan. (5) Praktek spekulasi dan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang strategis terutama pada saat terjadi gejolak harga. (6) Peningkatan harga/tarif jasa/komoditas strategis yang ditetapkan oleh pemerintah (*administered prices*) seperti misalnya TTL, tarif angkutan, BBM, dan LPG.

c. Kualitas Kebijakan

Kualitas kebijakan TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya pengendalian inflasi daerah adalah sebagai berikut *“Baik, dengan memberikan/mengeluarkan rekomendasi kebijakan terhadap inflasi yang terjadi dalam rapat-rapat TPID mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam bentuk kegiatan-kegiatan di lapangan”* (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)

Kualitas kinerja instansi-instansi/SKPD terkait dalam upaya pengendalian inflasi daerah selama ini *“Baik, dengan selalu menindaklanjuti terjadinya inflasi pada ketiga sektor yang menjadi tanggung jawabnya”*. Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap SKPD dalam melakukan pengendalian sebagai tanggung jawabnya.

Upaya TPID dalam rangka menurunkan inflasi daerah yang meningkat adalah sebagai berikut :

*“Terhadap kebijakan harga yang dibuat pemerintah dengan menyatukan serah pinjaman kembali kepada kementerian terkait untuk ditinjau kembali harga yang ditetapkan, sehingga harga tidak memberatkan masyarakat. Terhadap harga pangan serta jasa diarahkan dilakukan operasi pasar”*(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)

Kepatuhan TPID Provinsi Kalimantan Utara terhadap peraturan yang berlaku *“TPID provinsi kaltara selalu berserat pada koridor yang telah dilakukan oleh peraturan perundang-undangan”*(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3). TPID menjalin hubungan dengan masyarakat dan instansi terkait *“Sesuai dengan tugas dan fungsinya, menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaku ekonomi”*(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3).

TPID melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan dengan melalui variabel di *biro ekonomi.koltaraprov.go.id* dan langsung kepada masyarakat terkait *kebijakan baru terkait inflasi*” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)

Hal-hal yang dilakukan oleh TPID adalah dengan melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa; menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional; Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik; melakukan koordinasi dengan TPID pusat dan TPID Kabupaten/kota; melakukan langkah-langkah

lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi.

Peran setiap instansi dalam pengendalian inflasi adalah sebagai kepanjangan tangan dari TPID pusat untuk melakukan upaya dan langkah-langkah teknis dalam upaya pengendalian inflasi sesuai dengan kewenangannya. TPID memiliki koordinasi secara intens dengan TPID kabupaten/kota melalui rapat koordinasi tingkat provinsi, monitoring ke TPID kabupaten/kota dan sarana informasi melalui group whatsapp. TPID memiliki kontribusi yang besar dalam pengendalian inflasi di daerah utamanya terhadap inflasi yang disebabkan oleh *volatile food* (komponen barang bergejolak).

Kebijakan yang telah disusun TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah berupa *roadmap* pengendalian inflasi daerah. Sangat produktif karena di dalamnya mencakup solusi permasalahan jangka pendek dan jangka menengah. Sangat baik karena terbukti mampu mengendalikan inflasi sesuai target inflasi nasional. Kinerja SKPD belum memuaskan karena program dan kegiatan yang telah disusun belum sinkron dengan *roadmap pengendalian inflasi daerah*. Kendala TPID dalam melaksanakan pengendalian inflasi adalah kurangnya program dan kegiatan yang menyangkut pengendalian inflasi serta evaluasinya di SKPD teknis. Solusinya adalah dengan meningkatkan koordinasi antara TPID dengan SKPD teknis dalam hal kebijakan teknis pengendalian inflasi. Melalui rapat koordinasi TPID provinsi dan kabupaten/kota. Melalui pemanfaatan website Kalimantan Utara dan media masa melalui peningkatan koordinasi, Operasi pasar, pasar murah, Memastikan kecukupan stok, Kerjasama antar daerah dan Peningkatan produktivitas komoditas.

Agenda kerja TPID disusun mengacu pada roadmap pengendalian inflasi daerah. Caranya adalah dengan melaksanakan rapat koordinasi dan FGD untuk menemukan solusi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Cara TPID mengidentifikasi permasalahan di lapangan melalui analisis terhadap pemantauan berita statistic inflasi BPS Pemantauan / monitoring harga di beberapa pasar.

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari kualitas kebijakannya adalah kebijakan yang telah ditetapkan Provinsi Kalimantan Utara masih standar atau biasa saja atau sama dengan daerah lain. Belum ada inovasi dalam menyusun kebijakan sehingga permasalahan utama dalam mengurangi tingkat inflasi yang tinggi di Kalimantan Utara belum dapat diatasi dengan optimal.

#### d. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Sistem kerja yang dilakukan adalah memantau harga, pasokan dan mengantisipasi adanya lonjakan harga. Mekanisme rapat dilakukan triwulanan dan tim ini memberikan masukan berupa ulasan inflasi bulan sebelumnya, perkiraan untuk bulan berikutnya dan rekomendasi.

Cara TPID mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada di lapangan: ” Ada beberapa tahapan penyelesaian permasalahan di antaranya melakukan koordinasi secara intensif dengan dinas/OPD yang menangani komoditi terindikasi inflasi ”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3). Selain pendapat di atas dikemukakan sebuah pendapat

dibawah ini :*"Dengan menerima laporan dari masyarakat maupun melakukan monitoring ke lapangan"*(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)

Cara TPID menyusun program-program pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Utara adalah menyusun dasar hukum terlebih dahulu Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Us sebagai berikut *"Agenda laju rendah ditentukan dalam peraturan produk undangan dengan koordinasi dengan TPI pusat dan TPID kabupaten/kota secara berkala"* (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3). Pernyataan Us di atas diperkuat oleh pernyataan AA yaitu *"Melakukan intensitas pedalaman permasalahan dan menindaklanjuti sesuai kebutuhan"*(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3). Pendapat lainnya adalah sebagai berikut *"Rapat tim TPID yang dipimpin oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah ditindaklanjuti dengan tim teknis, yaitu dari pangan dan tim transportasi"*(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3)

Kendala TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan pengendalian inflasi daerah *"Para spekulan selalu memanfaatkan momen-momen tertentu seperti perayaan hari raya keagamaan untuk menaikkan harga secara tidak wajar"*. Solusi atas kendala tersebut adalah *"Membuat sebuah sistem informasi yang menampilkan setiap harga kelompok barang/jasa penyebab inflasi secara realtime"*(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Lantai 3).

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari akuntabilitas adalah kebijakan yang telah ditetapkan

TPID Provinsi Kalimantan Utara dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan hingga berbagai macam hal negatif yang ditimbulkan dari setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh TPID Provinsi Kalimantan Utara.

## **D. Pembahasan**

### **1. Proses Pembentukan TPID Provinsi Kalimantan Utara**

#### **a. Responsivitas**

*Responsivisness* (daya tanggap) adalah kemauan atau keinginan para karyawan untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen. Membiarkan konsumen menunggu, terutama tanpa alasan yang jelas akan menimbulkan kesan negatif yang tidak seharusnya terjadi. Kecuali apabila kesalahan ini ditanggapi dengan cepat, maka menjadi suatu yang berkesan dan menjadi pengalaman yang menyenangkan (Jasfar,2005:51). Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari tanggungjawabnya adalah TPID Provinsi Kalimantan Utara belum mampu mengenali kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara sehingga agenda, prioritas pelayanan dan program-program pelayanan yang disusun TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam pengendalian inflasi masih kurang pas dan kurang tepat sasaran.

Upaya pengendalian inflasi dalam rangka menciptakan stabilitas harga di tingkat nasional hanya dapat diwujudkan jika stabilitas harga terjadi pada tingkat daerah. Selain mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional, upaya pengendalian inflasi dan penciptaan stabilitas harga di daerah juga berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat setempat.

TPID Provinsi Kalimantan Utara belum melakukan langkah guna memperkuat kompetensi anggota di tataran teknis, seperti *workshop*. *Workshop* ini mengikutsertakan anggota tim teknis TPID Provinsi Kalimantan Utara. *Workshop* inflasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman TPID terhadap konsep, definisi, serta dasar-dasar perhitungan inflasi di Kalimantan Utara. Selain itu, *workshop* ini juga bertujuan untuk menambah wawasan peserta mengenai perkembangan terkini resiko tekanan inflasi ke depan, dan dampak berbagai kebijakan *administered prices* dan faktor eksternal terhadap inflasi. Adanya *workshop* di atas, diharapkan mampu meningkatkan responsibilitas TPID dalam melakukan perhitungan dan uji potensi risiko tekanan terhadap stabilitas harga.

#### **b. Pemrosesan Informasi**

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu membangun informasi harga pangan yang terpadu dan terpercaya (kredibel) yang dapat menjadi acuan bagi pelaku ekonomi secara umum. Untuk mencapai hal tersebut, maka pengembangan PIHPS harus memenuhi kriteria *consistent, reliable, accurate, timely, and accessible* (CRATA). Sistem informasi yang dikembangkan adalah dengan membuat *website* TPID Provinsi Kalimantan Utara. Selama ini Kalimantan Utara belum memiliki *website* yang dikhususkan untuk menampilkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Kalimantan Utara. Pengembangan *website* TPID Provinsi Kalimantan Utara ini dimaksudkan untuk menampilkan informasi terkait perkembangan ekonomi dan stabilitas harga (inflasi) di daerah, mensosialisasikan kebijakan/program TPID Provinsi Kalimantan Utara maupun kegiatan-kegiatan SKPD yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait upaya

mewujudkan stabilitas harga di daerah. Pengembangan website ini juga digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi kegiatan koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi Kalimantan Utara untuk penyampaian laporan kegiatan yang dapat dilakukan secara *online*, menjadi media alternatif bagi peningkatan efektivitas pengendalian inflasi daerah melalui berbagai forum interaktif, dan menjadi media bagi TPID Provinsi Kalimantan Utara untuk mendapatkan feedback/masukan dari pemerintah daerah lainnya ataupun dari masyarakat dan pelaku usaha

Selain itu, adanya website khusus TPID Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat mengoptimalkan sistem informasi perdagangan antar daerah untuk mendukung berbagai program kerjasama perdagangan antar daerah. Pengembangan pusat distribusi pangan perlu mempertimbangkan kesiapan multi moda transportasi dan partisipasi aktif pelaku usaha. Mengawal berbagai kesepakatan terkait langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong kerjasama perdagangan antar daerah, termasuk merumuskan berbagai kendala yang perlu diselesaikan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Peningkatan akses informasi terkait pengendalian inflasi juga perlu dilakukan melalui pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) disertai penguatan basis data informasi harga pangan yang telah ada saat ini (*existing*). Penyusunan blueprint PIHPS Provinsi Kalimantan Utara akan terus dikaji dan diperdalam dengan arah pengembangan kepada penguatan basis data informasi harga pangan yang telah ada saat ini (*existing*) serta mengoptimalkan diseminasi informasi harga pangan kepada masyarakat. Penyusunan *blueprint* pengembangan PIHPS Provinsi Kalimantan Utara juga akan diselaraskan dengan dinamika yang berkembang terkait penerbitan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan pada November 2012 yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi.

Pembenahan basis data pada sistem yang telah dikembangkan selama ini di berbagai lembaga menjadi langkah penting untuk menjamin kredibilitas data yang dibangun dalam PIHPS. Pengembangan PIHPS Provinsi Kalimantan Utara secara komprehensif akan dituangkan di dalam suatu *blueprint* yang disusun bersama beberapa kementerian/lembaga terkait. Sebagai tahapan awal telah dilakukan diskusi terfokus dan penjajakan kerjasama informasi harga pangan dengan kementerian pertanian dan kementerian perdagangan, serta menginisiasi kerjasama pengembangan PIHPS dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai *pilot project*.

Pengembangan pilot project PIHPS Kalimantan Utara perlu difokuskan kajian kelayakan pengembangan PIHPS dan upaya pembenahan basis data informasi harga pangan Kalimantan Utara. TPID Kalimantan Utara bekerjasama dengan lembaga riset mengkaji lebih dalam kelayakan dari pengembangan PIHPS di Kalimantan Utara dan pemetaan basis data harga pangan yang ada saat ini. Selanjutnya juga ditelaah secara lebih jauh proses pengumpulan data harga yang saat ini berlaku dan menyusun rancangan *business process* dari pengumpulan data yang ideal. Secara umum, hasil kajian dapat menggambarkan perlu adanya suatu data informasi harga yang terintegrasi sebagai referensi bagi masyarakat dan juga para penentu kebijakan. Di samping itu, hasil kajian mendukung perlunya penataan kelembagaan dan proses bisnis dalam rangka membangun pusat informasi harga yang kredibel. Dalam hal ini, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Utara memiliki peran strategis dari sejak proses pengumpulan data, pengolahan data, hingga diseminasi data tersebut kepada masyarakat.

Untuk memperkaya dasar rujukan pengembangan sistem manajemen informasi PIHPS, TPID Kalimantan Utara harus mengkaji pemanfaatan sistem teknologi yang terintegrasi terkait pengumpulan data harga. Dalam kaitan ini, dapat dilakukan kunjungan ke Sentra Pelayanan Agrobisnis (SAPA) yang merupakan klaster industri pertanian terpadu di Sukabumi yang telah memanfaatkan mobile information sistem dalam proses pengumpulan informasi produksi dan harga. Penggunaan sistem teknologi informasi SAPA memungkinkan tidak hanya dilakukannya pengawasan terhadap harga jual di outlet ritel penjualan, namun juga pengawasan terhadap luas areal panen secara lebih akurat (dengan mengadaptasi teknologi geo spasial), sarana produksi yang dibutuhkan, serta informasi besar dana yang dapat disalurkan oleh LKM (sebagai modal biaya produksi) kepada petani sesuai dengan tahapan produksinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi harga pangan yang kredibel dan dapat diakses dengan mudah, cepat dan akurat oleh masyarakat berperan penting untuk mengatasi permasalahan structural terkait disparitas harga pangan. Minimnya informasi harga pangan yang terpercaya menyebabkan ekspektasi harga pangan yang terbentuk di masyarakat bersumber dari informasi yang tidak lengkap (*asymmetric information*). Hal ini menyebabkan pembentukan harga rentan dipengaruhi oleh aksi spekulasi dan persepsi. Dalam kaitan ini, perlu ditempuh suatu strategi untuk mendorong peningkatan akses informasi harga kepada masyarakat. Adanya akses terhadap informasi harga pangan yang kredibel diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat, produsen, dan pemangku kebijakan yang pada gilirannya akan dapat mendorong pada pembentukan harga yang lebih efisien.

### c. Komunikasi

Untuk meningkatkan koordinasi di antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, TPID Kalimantan Utara telah mengagendakan beberapa agenda pertemuan periodik yang melibatkan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dalam setiap pertemuan koordinasi yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan berbagai kesepakatan untuk mengatasi permasalahan yang dapat meningkatkan ketidakstabilan harga di daerah. Beberapa rapat koordinasi yang telah direncanakan antara lain rapat koordinasi nasional (Rakornas) TPID, rapat koordinasi pusat-daerah serta rapat koordinasi rutin pokjans TPID Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat koordinasi nasional (Rakornas) TPID merupakan forum koordinasi tahunan yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah. Penyelenggaraan rakornas TPID diarahkan untuk menghasilkan rumusan solusi kebijakan dari pemerintah pusat yang diperlukan guna mengatasi permasalahan inflasi di daerah, menetapkan arah prioritas pengendalian inflasi daerah sepanjang tahun berjalan, serta mengevaluasi program pengendalian inflasi di daerah yang merupakan bagian dari tindak lanjut kesepakatan rakornas tahun sebelumnya.

Tabel 4.9. Pokok-Pokok Kesepakatan Rakorwil TPID KTI Tahun 2018

| No. | Poin Kesepakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Output                              | PIC                          | Batas Waktu | Pelaporan |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--|
| 1.  | Pemerintah daerah perlu memberi perhatian pada struktur keanggotaan TPID agar sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007. Perubahan struktur menjadi pondasi awal yang penting bagi penguatan komitmen pemerintah dalam upaya stabiitasi harga di daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SK Gubernur, SK Walikota, SK BUpati | Pemprov, Pemkot, Pemkab      | Juni 2018   | BI TPIP   |  |
| 2.  | Pemerintah Daerah bersama seluruh <i>stakeholders</i> yang tergabung dalam TPID merumuskan roadmap pengendalian inflasi daerah dengan memperhatikan :<br>a. Sinkronisasi <i>roadmap</i> inflasi dengan program pengembangan ekonomi daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Hal ini dilakukan sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi<br>b. Pemetaan sumber penyebab inflasi daerah sehingga mampu menghasilkan kualitas <i>roadmap</i> pengendalian inflasi daerah sebagai usulan bagi penyusunan roadmap inflasi nasional ( <i>bottom up approach</i> ). | Roadmap TPID terbaru                | TPID                         | 2018        | BI TPIP   |  |
| 3.  | Pemerintah daerah agar merumuskan terobosan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi inefisiensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Usulan kebijakan, usulan ketentuan  | Pemda dan KwBI Provinsi/Kota | 2018        | BI TPIP   |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |      |         |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|---------|--|
|    | <p>dalam tata niaga disertai alokasi anggaran yang memadai dalam APBD. Beberapa terobosan kebijakan antara lain melalui :</p> <p>a. Pengembangan inovasi kerjasama antar daerah (KAD) untuk memitigasi inefisiensi distribusi barang. Selama ini distribusi barang/komoditas paling banyak terjadi satu arah sehingga biaya logistik dibebankan kepada harga komoditas yang dijual di daerah tujuan. Untuk memitigasi hal ini perlu adanya KAD agar distribusi barang terjadi dua arah sehingga dapat menekan biaya logistik. Pelaksanaannya perlu didukung dengan peraturan daerah</p> <p>b. Bank Indoensia di daerah diharapkan dapat menginisiasi kajian pemetaan surplus defisit sebagai dasar pemetaan kerjasama antar daerah</p> <p>c. Mengaktifkan rumah pangan kita yang ada di daerah sebagai jaringan distribusi yang diintegrasikan dengan jalur tol laut dan jalur tol darat</p> <p>d. Mendorong penggunaan transaksi perdagangan online platform lokal (e-commerce)</p> |                          |                          |      |         |  |
| 4. | Pemerintah daerah melakukan penguatan koordinasi antar pemangku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laporan hasil koordinasi | Pemda dan KPwBI Provinsi | 2018 | BI TPIP |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                   |                      |         |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------|--|
|    | kepentingan di daerah dalam upaya stabilitas harga, pengelolaan pasokan dan distribusi pangan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani, antara lain melalui kerjasama dengan BULOG dan Bappepti serta pengelolaan gudang (SRG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (MoU), perjanjian kerjasama, dll   |                                   |                      |         |  |
| 5. | <p>Pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat kebijakan dan koordinasi untuk memastikan ketersediaan, kecukupan serta keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat khususnya selama HBKN. Hal ini dilakukan antara lain dengan :</p> <p>a. memastikan ketersediaan dan kecukupan cadangan pangan strategis</p> <p>b. penyelenggaraan pasar murah</p> <p>c. Bersama satgas pangan melakukan monitoring kewajaran stok pangan digudang-gudang secara berkala</p> <p>d. Bersama tokoh masyarakat termasuk para alim ulama tokoh agama memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak</p> | Laporan kegiatan                   | Pemda dan KPwBI Provinsi/Kota     | Periode HBKN 2018    | BI TPIP |  |
| 6. | Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia merumuskan langkah strategis pengendalian tariff angkutan udara yang dapat dilakukan dengan mereplikasi inovasi pada daerah yang telah berhasil meredam inflasi angkutan udara diantaranya mengusulkan rute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Usulan kebijakan, Usulan ketentuan | Pemda dan KPwBI Provinsi/Kab/Kota | Sebelum periode HBKN | BI TPIP |  |

|                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| penerbangan yang efisien sehingga mampu menekan tariff angkutan udara dan mengusulkan tariff batas atas |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

*Sumber : Rapat Koordinasi TPID Provinsi Kalimantan Utara, 2018*

Penyelenggaraan rapat rutin TPID Kalimantan Utara bertujuan untuk memetakan permasalahan stabilisasi harga yang dihadapi setiap kabupaten / kota serta mengidentifikasi langkah koordinasi dan kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mengantisipasinya. Kompleksitas permasalahan stabilisasi harga di daerah memungkinkan rapat koordinasi di tataran teknis pokjanas TPID untuk menghadirkan pemerintah daerah (TPID), kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha dan asosiasi (Kadin, Apindo dan sebagainya), serta narasumber lain yang kompeten.

Apabila terdapat permasalahan yang membutuhkan kebijakan pemerintah pusat, maka usulan kebijakan tersebut akan diangkat dalam rapat koordinasi pada tataran yang lebih tinggi (*high level meeting*). Selain itu, penyelenggaraan rapat koordinasi rutin ini juga bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian inflasi pada tahun berjalan, baik di tataran pusat (Pokjanas TPID) maupun di daerah (TPID). Selanjutnya, berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan pengendalian inflasi daerah dan hasil evaluasi kegiatan pada tahun berjalan, akan dirumuskan arah kebijakan pengendalian inflasi TPID untuk tahun berikutnya.

Menurut Fatimah (2013) sebagai langkah untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap rendah dan stabil, Bank Indonesia membentuk suatu wadah koordinasi antara BI, Pemerintah dan dinas terkait untuk turut serta dalam usaha menjaga tingkat inflasi tersebut. Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia telah

diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPID) Provinsi Kalimantan Utara. Berbagai inisiatif kebijakan yang ditempuh oleh daerah yang diarahkan untuk peningkatan produksi pangan, pengamanan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi bagi masyarakat pada gilirannya berdampak positif bagi terjaganya stabilitas harga di daerah. Kestabilan harga juga didukung oleh relatif stabilnya harga pada masa hari raya besar keagamaan sejalan dengan adanya langkah sejumlah daerah yang menempuh inisiatif penguatan komunikasi kepada masyarakat sehingga turut berkontribusi besar dalam mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.

Kelompok Kerja TPID berupaya mengarahkan peran TPID untuk mulai menyentuh persoalan *structural* di daerah dan merumuskan solusinya untuk dapat lebih menjamin terjaganya stabilitas harga. Untuk mendukung hal tersebut, Rakornas TPID Provinsi Kalimantan Utara hendaknya diarahkan pada pengelolaan cadangan pangan daerah melalui sistem resi gudang (SRG), pengembangan perluasan aksesibilitas informasi harga bagi masyarakat melalui pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), dan penguatan kerjasama antar daerah.

## **2. Keluaran TPID Provinsi Kalimantan Utara**

### **a. Analisis Kritis**

TPID terus mendorong partisipasi aktif daerah di dalam memperkuat koordinasi guna stabilisasi harga, khususnya melalui pembentukan TPID. Memperkuat kesepahaman bersama terhadap pentingnya mendorong kelancaran perdagangan antar daerah dalam stabilisasi harga. Dari hasil analisis kritis, maka diusulkan bahwa kerjasama antar daerah itu penting. Kerjasama antar daerah

berperan penting untuk mengatasi perbedaan dan kesenjangan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Adanya perbedaan karakteristik sumber daya antar daerah menyebabkan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya pangan, tidak dapat dipenuhi hanya mengandalkan pada produksi lokal di masing-masing daerah, melainkan ada saling ketergantungan yang tinggi dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam kaitan ini, adanya kerjasama antar daerah yang kuat diharapkan menjadi solusi untuk memastikan kelancaran ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat.

Kerjasama antar daerah dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila ada kesadaran antar daerah yang saling membutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mewujudkan hal ini, perlu adanya komitmen dari masing-masing pemerintah daerah untuk mendahulukan kepentingan bersama. Krjasama antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat dapat menjamin kontinuitas pasokan, kelancaran arus distribusi, kebijakan lalu lintas barang di daerah pemasok dan tata niaga yang lebih tertata yang pada akhirnya dapat mewujudkan stabilitas harga. Kerjasama antar daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 dan Nomor 23 Tahun 2009. Peraturan tersebut memberikan payung hukum dan pedoman dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah yang didasarkan atas persamaan kepentingan dan kesetaraan kedudukan.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh perencanaan program kerja dan penggunaan anggaran yang terarah. Penetapan prioritas program dan perencanaan anggaran di daerah selain mempertimbangkan karakteristik daerah, juga perlu memiliki keselarasan dengan arah tujuan

pembangunan nasional. Di samping itu, dalam penetapan prioritas program dan perencanaan anggaran perlu mempertimbangkan dinamika dan prospek risiko dari keterhubungan ekonomi yang tinggi baik antar daerah maupun dengan negara-negara mitra dagang. Dalam kaitan ini, Pokjanas TPID mendorong adanya kesatuan pemahaman terhadap pentingnya penetapan asumsi makro di daerah sebagai dasar bagi penetapan prioritas kerja pemerintah daerah. Besaran asumsi makro yang ditetapkan di daerah sebagai dasar bagi penetapan prioritas kerja pemerintah daerah. Besaran asumsi makro yang ditetapkan di daerah turut mencerminkan adanya keselarasan dengan tujuan pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah yang terlihat pada struktur dan postur perencanaan anggaran pembangunan daerah.

Pemerintah pusat berperan penting dalam mewujudkan optimalnya peran dan komitmen pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat kelancaran perdagangan antar daerah terutama dari aspek regulasi dan kelembagaan melalui instrument kerjasama daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan keterlibatan pihak swasta/dunia usaha dalam kerjasama antar daerah. Perlunya peranan pemerintah daerah dalam mendorong dan memperkuat peran BUMD dan Kamar Dagang Indonesia Daerah (Kadinda) dalam rangka meningkatkan kerjasama daerah. Mendorong peran dan fungsi koperasi serta meningkatkan kesiapan daerah untuk dapat mengimplementasikan SRG secara optimal.

TPID Provinsi Kalimantan Utara perlu menyusun kebijakan untuk memperkuat cadangan pangan daerah melalui upaya percepatan penerapan sistem resi gudang (SRG) di Berbagai Daerah. Penerapan SRG menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat memperkuat cadangan pangan daerah ditengah masih

tingginya ketergantungan produksi pangan pada faktor musim. Pola produksi pangan yang masih sangat tergantung pada musim berdampak pada pergerakan harga pangan yang diwarnai tekanan pada masa paceklik. Kondisi ini juga turut berpengaruh pada pendapatan petani yang tidak optimal di masa panen, namun juga tidak dapat mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga pada masa paceklik. Dalam kaitan ini, SRG menjadi suatu solusi yang dapat mendorong terjaganya kesinambungan pasokan pangan sepanjang tahun bagi masyarakat dan juga memperbaiki pendapatan petani.

Rakornas III TPID menyepakati untuk mendorong penerapan SRG di daerah melalui pembentukan *task force* percepatan penerapan SRG. *Task force* tersebut menjadi wadah koordinasi di tingkat pusat untuk merumuskan strategi dan upaya yang perlu dilakukan untuk berbagai mendorong penerapan SRG di berbagai daerah. Adapun lembaga yang akan menjadi ujung tombak dalam *task force* percepatan implementasi SRG adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, dan beranggotakan kementerian/lembaga, Bank Indonesia, BUMN/BUMD, pihak swasta, perbankan, pemerintah daerah dan DPRD.

Selain itu, Pokjanas TPID juga perlu melakukan beberapa langkah penguatan cadangan pangan yaitu melalui benchmarking penerapan SRG di Haurgeulis (Kabupaten Indramayu) dan penyusunan kajian cadangan pangan.

Pokjanas TPID menekankan pada aspek penguatan kelembagaan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga di daerah. Dalam kaitan ini, beberapa program yang dilaksanakan oleh pokjanas TPID untuk memperkuat aspek kelembagaan ialah penyusunan buku pedoman baku pelaksanaan TPID, pengukuran kinerja pengelolaan inflasi daerah, memfasilitasi

pembentukan TPIAD baru, penyelenggaraan rakor pusat-daerah dan rakorwil TPID, serta peningkatan kompetensi anggota TPID.

Semakin luasnya partisipasi daerah untuk turut menjaga stabilisasi harga perlu didukung adanya suatu pedoman yang dapat menjadi acuan baku di dalam pelaksanaan koordinasi stabilisasi harga di daerah. Dalam kaitan ini, Pokjanas TPID memprioritaskan pada penguatan aspek kelembagaan melalui penyusunan dasar hukum bagi pelaksanaan TPID

Ke depan, untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Pokjanas TPID menyepakati perlu adanya suatu pedoman baku penyelenggaraan forum koordinasi. Pedoman tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan bersama anggota pokjanas TPID dalam menyelenggarakan rakor pengendalian inflasi daerah. Adapun hal-hal yang diatur dalam pedoman tersebut antara lain meliputi penentuan tema, tujuan kegiatan, jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, peserta rapat yang akan diundang dan sumber pembiayaan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan penyelenggaraan rakor pengendalian inflasi dapat lebih efektif dan efisien serta lebih terarah.

#### **b. Kesadaran Diri**

TPID diharapkan menjadi katalisator yang dapat mempercepat implementasi program pemerintah dan memperkuat sinergi berbagai program pembangunan di daerah. Keberadaan TPID diarahkan untuk turut berperan aktif di dalam pengembangan ekonomi daerah pada konteks yang lebih luas. Dalam kerangka otonomi daerah, TPID mengedepankan kapasitas dan karakteristik dari masing-masing daerah sebagai bagian penting upaya stabilitasi harga. Dengan kaitan ini, TPID diarahkan untuk turut mendorong pembangunan ekonomi

antara lain melalui pengembangan sektor utama dan produk unggulan daerah. Untuk mencapai hal tersebut, upaya memperkuat sinergi berbagai program pembangunan di daerah dan forum yang telah ada seperti Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) akan terus dilakukan. Strategi pengembangan produk unggulan daerah difokuskan kepada pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya dan kompetensi lokal dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran serta menciptakan pembangunan berkelanjutan di berbagai daerah.

Langkah TPID untuk turut mendorong pengembangan produk unggulan daerah memiliki nilai strategis karena akan mendorong kemandirian daerah. Upaya mendorong pengembangan produk unggulan daerah bertujuan untuk menumbuhkan kembangkan potensi sumber daya yang dimiliki, memperluas kesempatan kerja dan sekaligus menjadikan sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan. Dalam kaitan ini, sejumlah TPID dalam beberapa waktu terakhir telah mendorong pengembangan komoditas pangan khas daerah seperti pengembangan komoditi rumput laut di kawasan timur Indonesia, komoditi cabai jawa dan sumatera, komoditi bawang merah di Palangkaraya, dan lain sebagainya. Berbagai langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan daya saing ekonomi daerah dan secara bertahap meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Keberadaan TPID menjadi komitmen bersama Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mendorong peningkatan efektivitas peran TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Program TPID menekankan pada aspek penguatan kelembagaan TPID dan menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai pada Rapat koordinasi TPID. Prioritas TPID pada penguatan aspek kelembagaan dilandasi

pertimbangan perlunya mendorong peningkatan efektivitas peran TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Dalam kaitan ini, TPID masih memandang perlunya payung hukum untuk mendukung konsistensi peran TPID dan sekaligus memberikan mekanisme koordinasi yang lebih baik. Hal ini menjadi sangat penting mempertimbangkan semakin luasnya dukungan pemerintah daerah untuk turut aktif menjaga stabilitas harga sebagaimana tercermin dari jumlah TPID yang telah terbentuk.

Peran TPID Kalimantan Utara adalah sebagai katalisator bagi upaya penyelesaian permasalahan struktural agar dapat lebih menjamin terjaganya stabilitas harga di daerah. Permasalahan terkait tingginya ketergantungan produksi pangan terhadap faktor musim, keterbatasan akses informasi harga dan pasongan pangan, serta belum memadainya infrastur logistic menyebabkan besarnya disparitas harga antar daerah. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan harga pangan rentan mengalami gejolak. Keberadaan TPID sebagai forum koordinasi lintas sektor yang ada di daerah diharapkan mampu merumuskan solusi yang komprehensif bagi upaya mengatasi persoalan structural yang ada.

Rapat koordinasi TPID yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara menyimpulkan tiga sasaran prioritas program sebagai langkah awal dalam penyelesaian kendala structural di daerah. Ketiga program tersebut ialah penguatan cadangan pangan daerah melalui percepatan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG), memperluas akses informasi harga bagi masyarakat, dan meningkatkan kesepahaman bersama terhadap pentingnya kerjasama daerah dalam stabilisasi harga.

Semakin luasnya keberadaan TPID Kalimantan Utara disertai intensifnya upaya untuk menjaga stabilitas harga berperan penting pada

tercapainya sasaran inflasi nasional. Secara umum, berbagai langkah kebijakan daerah dalam upaya stabilisasi harga, terutama harga pangan, mendukung terkendalinya inflasi nasional. Beberapa inisiatif kebijakan diarahkan pada upaya pengamanan pasokan melalui kelancaran distribusi, stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen serta memperkuat efektivitas komunikasi kepada masyarakat antara lain melalui iklan layanan masyarakat serta penerbitan siaran pers. Di samping itu, beberapa daerah mendorong dilakukannya kampanye diversifikasi pangan sebagai bagian penting untuk stabilitas harga pangan.

Ke depan, TPID Provinsi Kalimantan Utara akan mendorong penguatan peran daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko pengendalian inflasi di daerah dan menyelaraskan pandangan daerah terhadap dinamika makroekonomi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Untuk mengakselerasi penyelesaian berbagai persoalan structural terkait pengendalian inflasi, perlu diawali adanya kesatuan pandangan antara daerah dan pusat dalam menerangi dinamika ekonomi yang dihadapi dan arah kebijakan yang perlu ditempuh. Dalam kaitan ini, program akan menekankan pada pentingnya keselarasan arah besaran sasaran makroekonomi daerah yang tertuang di dalam rencana kerja pemerintah daerah dengan besaran makroekonomi yang menjadi landasan arah kebijakan pemerintah pusat.

TPID memang perlu disempurnakannya *business process* penetapan asumsi makro ekonomi dalam perencanaan anggaran di daerah sebagai langkah awal yang penting untuk menyelaraskan perencanaan nasional dengan perencanaan dan penganggaran di daerah.

### c. Kualitas Kebijakan

Menurut Tjiptono (2004:89), ada beberapa faktor dominan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan salah satu strategi peningkatan kualitas pelayanan adalah mengelola bukti kualitas jasa. Mengelola bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Oleh karena itu, jasa merupakan kinerja dan tidak dapat dirasakan seperti barang, maka pelanggan cenderung memperhatikan fakta-fakta (*tangible*) yang berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas. Dari sudut pandang perusahaan jasa, bukti kualitas meliputi segala sesuatu yang dipandang pelanggan sebagai indikator seperti apa jasa yang akan diberikan (*preservice expectation*) dan seperti apa jasa yang telah diterima (*postservice expectation*).

Kualitas kebijakan yang disusun TPID Kalimantan Utara pada dasarnya masih kurang tepat, selama ini untuk menurunkan inflasi berfokus pada operasi pasar. Operasi pasar ini memiliki peran yang tidak signifikan dalam pengendalian inflasi, cenderung hanya menghabiskan anggaran saja. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan beberapa strategi dan upaya pengendalian inflasi di daerah. *Pertama*, mendorong dana dekonsentrasi untuk didesentralisasikan atau menjadi dana DAK. *Kedua*, mempercepat proses perizinan, antara lain dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Kalimantan Utara. *Ketiga*, mendorong keterlibatan aktif swasta dalam pembangunan infrastruktur. Keempat, meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah. Kelima mendorong Pemda dalam meningkatkan tata laksana, kualitas dan percepatan pelayanan perizinan

dan non perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business*.

Strategi dan upaya pengendalian inflasi keenam, mendorong percepatan dana transfer pusat Ke daerah. Strategi ketujuh, mendorong percepatan realisasi APBD. Kedelapan, mencabut atau membatalkan Perda yang menghambat investasi. Kesembilan, melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### d. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab?. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti dalam manajemen sektor publik. Dalam konteks organisasi pemerintah, sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam

sebuah rantai komando formal. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, para manajer publik diharapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan pasif menjadi seorang yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik. Oleh karena itu, makna akuntabilitas menjadi lebih luas dari sekedar proses formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik. Konsepsi akuntabilitas dalam arti luas ini menyadarkan kita bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi dalam rantai komando institusional, tetapi juga bertanggungjawab kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media masa, dan banyak *stakeholders* lain. Jadi, penerapan akuntabilitas ini, di samping berhubungan dengan penggunaan kebijakan administratif yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu (1) akuntabilitas vertikal dan (2) akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah.

Koordinasi kebijakan meliputi konsistensi kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas inflasi serta penguatan koordinasi antara BI dan pemerintah pusat-daerah dalam meminimalkan risiko kenaikan inflasi dari komoditas pangan dan komoditas strategis yang diatur oleh pemerintah.

Sesuai dengan prinsip dasar pengukuran kinerja TPID yaitu sederhana, transparan, objektif; pelaksanaan proses pengukuran kinerja TPID dilakukan dengan metode self assessment. Pengukuran kinerja mencerminkan dua aspek utama yaitu proses dan keluaran (output). Pokjanas TPID menyepakati bahwa aspek proses sebagai cermin dari komitmen daerah dalam upaya pengelolaan inflasi memperoleh penekanan dalam pengukuran kinerja secara keseluruhan. Pada aspek proses ini, tiga hal pokok yang diukur terkait dengan intensitas kegiatan TPID, koordinasi kebijakan yang dilakukan melalui TPID, dan juga pengelolaan ekspektasi masyarakat. Sementara itu, untuk aspek keluaran terdapat dua komponen utama yang diukur yakni terkait dengan besaran realisasi inflasi dan volatilitas inflasi di daerah tersebut.

Dalam menjaga obyektivitas hasil pengukuran kinerja TPID, TPID juga melibatkan tim penilai eksternal (*external reviewers*) yang independen dan kompeten. Penilaian oleh pihak eksternal terutama untuk menilai kualitas dari kegiatan utama yang dilakukan di daerah dalam rangka stabilisasi harga.

Pengukuran kinerja pengelolaan inflasi daerah ini akan dilakukan secara berkala. **Penyempurnaan mekanisme penilaian akan terus dilakukan**, antara lain dengan meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dan akademisi dalam proses penilaian kinerja pengelolaan inflasi daerah. Selain itu, untuk meningkatkan obyektivitas pengukuran kinerja inflasi daerah, pokjanas TPID akan menyusun standar baku pengukuran kinerja pengelolaan inflasi. Ke depan, aspek penilaian akan difokuskan pada inovasi kebijakan daerah serta kontinuitas kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas harga di daerahnya masing-masing

Pengukuran kinerja pengelolaan inflasi daerah dimaksudkan untuk mengukur efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan oleh TPID baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Melalui diskusi yang mendalam dengan berbagai pihak (akademisi, kementerian/lembaga), dan pemerintah daerah), TPID merumuskan mekanisme pengukuran kinerja pengelolaan inflasi daerah. Pengukuran Kinerja TPID difokuskan pada berbagai aspek koordinasi stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya melalui TPID, dalam upaya menjaga stabilitas harga di daerahnya masing-masing sepanjang tahun.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut :

##### **1. Proses**

###### **a. Responsivitas**

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari responsibilitasnya adalah TPID telah mampu memberikan rekomendasi solusi yang dihasilkan dan memerlukan penanganan langsung dari Pemerintah Pusat dikomunikasikan oleh Pokjanas TPID kepada kementerian/lembaga terkait.

###### **b. Pemrosesan Informasi**

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari pemrosesan informasi, TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam proses pengendalian inflasi Provinsi Kalimantan Utara telah memproses informasi mengenai perkembangan inflasi di Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya, dan setiap Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara pada khususnya dengan baik. TPID Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki dukungan data yang banyak, lengkap, dan valid baik dari BPS Kalimantan Timur maupun Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara.

###### **c. Komunikasi**

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari komunikasi, TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam proses pengendalian inflasi Provinsi Kalimantan Utara masih memiliki tingkat komunikasi yang rendah dimana komunikasi hanya dilakukan melalui rapat koordinasi dan dilaksanakan pada saat terjadi masalah inflasi yang sudah meninggi saja.

## 2. Keluaran TPID Provinsi Kalimantan Utara

### a. Analisis Kritis

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari analisis kritisnya, TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun sebuah kebijakan pengendalian inflasi belum berdasarkan analisis secara kritis terhadap permasalahan-permasalahan inflasi yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara. Langkah-langkah yang ditetapkan masih sebatas formalitas dan seremonial seperti melakukan rapat koordinasi saja.

### b. Kesadaran Diri

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari kesadaran diri, TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun sebuah kebijakan pengendalian inflasi belum memiliki kesadaran diri yang tinggi. Hal ini menyebabkan kebijakan yang telah dibuat pun menjadi belum tepat sasaran dan berkualitas.

### c. Kualitas Kebijakan

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari kualitas kebijakannya adalah kebijakan yang telah ditetapkan Provinsi Kalimantan Utara masih standar atau biasa saja atau sama

dengan daerah lain. Belum ada inovasi dalam menyusun kebijakan sehingga permasalahan utama dalam mengurangi tingkat inflasi yang tinggi di Kalimantan Utara belum dapat diatasi dengan optimal.

#### d. Akuntabilitas

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja TPID Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari akuntabilitas adalah kebijakan yang telah ditetapkan TPID Provinsi Kalimantan Utara dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan hingga berbagai macam hal negatif yang ditimbulkan dari setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh TPID Provinsi Kalimantan Utara.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Dari sisi proses pembentukan TPID Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah perlu mengoptimalkan komitmen TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya pengendalian inflasi daerah di Provinsi Kalimantan Utara. TPID Provinsi Kalimantan Utara harus menjadi inisiator koordinasi dan sinergitas dalam pengendalian inflasi di daerah bagi semua *stakeholder* yang terlibat dan berkontribusi dalam menstabilkan inflasi harga demi jangkauan daya beli masyarakat yang luas untuk kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Dari sisi keluaran

TPID Provinsi Kalimantan Utara perlu memikirkan keluaran berupa kebijakan pengendalian harga lainnya, seperti cara pencegahan kenaikan harga, koordinasi dengan badan pelayanan kesehatan, koordinasi dengan dinas pertanian,

koordinasi dengan dinas perindustrian dan perdagangan dan pihak terkait lainnya yang berkaitan dengan 7 kelompok komoditi penyumbang IHK agar tingkat inflasi dan persistensi rendah dan mendorong stabilitas inflasi di Kalimantan Utara. Misalnya dengan mencetuskan penanaman cabai, bawang, sayur dan buah pada lahan yang ada di rumah sehingga rumah tangga bisa memenuhi kebutuhan beberapa komoditas diatas, karena komoditas diatas merupakan salah satu komoditas yang turut menyumbangkan bobot inflasi yang besar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianus, Fery dan Niko, Amelia, 2006. *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode: 1997:3 – 2005:2*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 2, Agustus 2006 Hal: 173-186.
- Baasir, F. 2003. *Pembangunan dan Crisis*. Jakarta:Pustaka Harapan.
- Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Berbagai edisi penerbitan dan website:www.bi.go.id. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Berbagai edisi penerbitan dan website :www.bi.go.id . Jakarta : Bank Indonesia.
- Boediono, 1998. *"Ekonomi Moneter"*. Edisi 3, Yogyakarta : BPFE UGM
- Endri. 2008. *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.13 No.1 April 2008 Hal 1 -13
- Gujarati, DN. 1995. *Basic Econometrics*. 3th Ed. McGraw-Hill.
- Hamdi, 2010. *Analisis pencapaian stabilitas inflasi dengan pendekatan harga di Indonesia*. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara
- Ikasari, Hertiana, 2005. *Determinan Inflasi (Pendekatan Klasik)"*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
- Ilyas, Achyar.1999. *Menuju Kestabilan Nilai Rupiah Melalui Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi*. Makalah Diskusi Panel Kemandirian Bank Indonesia Pasca UU NO. 23 Tahun 1999. Jakarta
- Iwardono. 1990. *Uang dan Bank*. Edisi 4. BPFE : Yogyakarta
- Kaufman A. 1985. *Implementing Problem-Based Medical Education Lessons From Successful Innovations*. New York: Springer Publishing Company. p. 165-158, 57-46, 17.
- Khalwaty, T. 2000. *Inflasi dan solusinya*. Jakarta: Gramedia
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Keempat. Terjemahan. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Manurung, Mandala. 2001. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta :LPFE-UI.
- Nasution, Anwar. 2001. *Kerangka Kerja Kebijakan Moneter bank Indonesia Pasca Krisis*. Makalah Seminar Nasional di FE UNDIP Dalam Rangka Dies Natalis ke 44. Semarang.
- Nopirin, 1986. *Ekonomi Moneter jilid I dan II*. Jogjakarta : BPFE UGM

- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Didik J, dkk. 2000. *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*. Jakarta: PT. Mardi Mulyo.
- Samuelson, Paul dan William Nordhaus. 1994. *Makro Ekonomi*, edisi 14, Alih Bahasa Drs Haris Munandar, Erlangga, Jakarta.
- Santoso, Wijoyo dan Iskandar. 1999. *Kebijakan Moneter dengan Inflation Targetting (Konsiderasi kemungkinan penerapan inflation targeting di Indonesia)*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Soediyono. 1992. *Ekonomi Makro, Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregat*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Liberty.
- Sudarman, Ari. 1984. *Teori Ekonomi Mikro*, Edisi 3. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern Perkembangan pemikiran Ekonomi Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Suryantoro, Agustinus. 2000. *Studi Tentang Inflasi di Indonesia (Tinjauan teoritis dan Studi Empirik)*. Media Ekonomi & Bisnis. Vol XII No. 2. DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 88
- Susanti, Hera, Moh. Ikhsan, dan Widyanti. 2000. *Indikator-Indikator Makroekonomi* ed. 2. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Tedy Herlambang dkk. 2001. *Ekonomi Makro: Teori, Analisis dan Kebijakan*. Jakarta: Gramedia Boediono (1980:105)

## **LAMPIRAN**

- I. Pedoman Wawancara
- II. Wawancara dengan Pj. Sekda Provinsi Kalimantan Utara
- III. Wawancara dengan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- IV. Wawancara dengan Kabid Pertanian mewakili Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara
- V. Wawancara dengan Kabid Perindagkop mewakili Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Gambaran Umum TPID**

1. Apa tujuan dibentuknya TPID bagi Provinsi Kalimantan Utara?

Jawaban :

2. Apa manfaat dibentuknya TPID bagi Provinsi Kalimantan Utara?

Jawaban :

3. Apa sajakah yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mengendalikan inflasi daerah?

Jawaban :

4. Bagaimanakah peran setiap instansi/lembaga/dinas/SKPD di Provinsi Kalimantan Utara dalam mengendalikan inflasi daerah?

Jawaban:

5. Apakah TPID Provinsi Kalimantan Utara memiliki koordinasi secara intens dengan TPID Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara?

Jawaban :

6. Seberapa besar kontribusi adanya TPID Provinsi Kalimantan Utara terhadap pengendalian inflasi daerah?

### **B. Produktivitas**

1. Kebijakan apa sajakah yang telah disusun oleh TPID dalam rangka mengendalikan inflasi daerah?

Jawaban :

2. Apakah selama ini kebijakan yang diambil produktif untuk mengendalikan inflasi daerah?

Jawaban :

**C. Kualitas Layanan.**

3. Bagaimanakah kualitas TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya pengendalian inflasi daerah?

Jawaban :

4. Bagaimanakah kualitas kinerja instansi-instansi/SKPD terkait dalam upaya pengendalian inflasi daerah selama ini?

Jawaban :

5. Apa kendala TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan pengendalian inflasi daerah?

Jawaban :

6. Bagaimanakah solusi atas kendala tersebut?

Jawaban :

**D. Responsivitas**

7. Bagaimanakah cara TPID mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada di lapangan ?

Jawaban :

8. Bagaimanakah cara TPID menyusun agenda kerja pengendalian inflasi ?

Jawaban :

9. Bagaimanakah cara TPID mengembangkan program-program kerja sesuai dengan permasalahan?

Jawaban :

**E. Responsibilitas**

10. Bagaimana upaya TPID dalam rangka menurunkan inflasi daerah yang meninggi?

Jawaban :

11. Bagaimanakah loyalitas kerja sesama anggota TPID Provinsi Kalimantan Utara?

Jawaban :

12. Bagaimanakah kepatuhan TPID Provnsi Kalimantan Utara terhadap peraturan yang berlaku?

Jawaban :

F. Akuntabilitas

13. Bagaimanakah TPID menjalin hubungan dengan masyarakat dan instansi terkait ?

Jawaban :

14. Bagaimanakah TPID melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan?

Jawaban :



| No. | Inisial Informan | Pertanyaan                                                                                                                               | Jawaban                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Us               | Apa tujuan dibentuknya TPID bagi Provinsi Kalimantan Utara                                                                               | TPID dibentuk untuk memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian juga pemantauan, mengevaluasi atas efektivitas kebijakan serta rekomendasi kebijakan sebagai upaya keterjangkauan barang dan jasa |
|     |                  | Apa manfaat dibentuknya TPID bagi Provinsi Kalimantan Utara                                                                              | Pengendalian inflasi daerah dan rekomendasi, saran dan pertimbangan yang mendukung sasaran inflasi kepada pemerintah pusat dan BI                                                                                  |
|     |                  | Apa sajakah yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mengendalikan inflasi daerah                           | Rakor pengendalian inflasi daerah<br>Membuat kebijakan berupa regulasi serta<br>Mengeluarkan rekomendasi kepada sektor-sektor terkait                                                                              |
|     |                  | Bagaimanakah peran setiap instansi/lembaga/dinas/SKPD di Provinsi Kalimantan Utara dalam mengendalikan inflasi daerah?                   | Menjalankan rekomendasi dan menyusun langkah-langkah pengendalian inflasi dan sesuai tupoksi                                                                                                                       |
|     |                  | Apakah TPID Provinsi Kalimantan Utara memiliki koordinasi secara intens dengan TPID kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan utara? | Ya                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                  | Seberapa besar kontribusi adanya TPID Provinsi Kalimantan Utara terhadap pengendalian inflasi daerah?                                    | Cukup besar                                                                                                                                                                                                        |
|     |                  | Kebijakan apa sajakah yang telah disusun oleh TPID dalam rangka mengendalikan inflasi daerah?                                            | Dalam proses pembuatan regulasi tentang HET                                                                                                                                                                        |
|     |                  | Apakah selama ini kebijakan yang diambil produktif untuk mengendalikan inflasi daerah                                                    | Saya rasa ya                                                                                                                                                                                                       |
|     |                  | Bagaimanakah kualitas TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya pengendalian inflasi daerah?                                            | Cukup baik                                                                                                                                                                                                         |
|     |                  | Bagaimanakah kualitas kinerja instansi-instansi/SKPD terkait dalam upaya pengendalian inflasi daerah selama ini?                         | Cukup                                                                                                                                                                                                              |

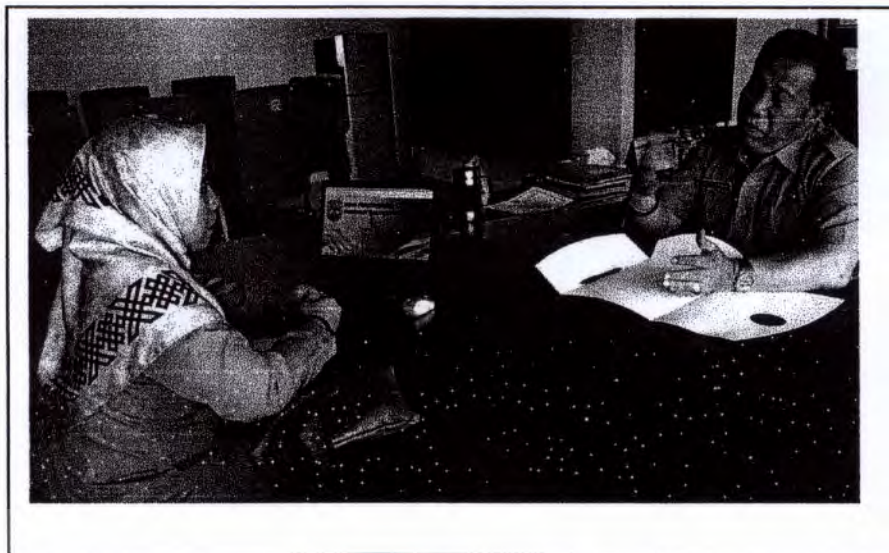
|    |    |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | Apa kendala TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan pengendalian inflasi daerah                      | Ada beberapa komoditi yang supply tergantung luar daerah yang menyebabkan inflasi tinggi                                                                      |
|    |    | Bagaimanakah solusi atas kendala tersebut?                                                                     | Antisipasi dengan memenuhi stok supply bekerja sama dengan dinas teknis terkait                                                                               |
|    |    | Bagaimanakah cara TPID mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada di lapangan                               | Ada beberapa tahapan penyelesaian permasalahan di antaranya melakukan koordinasi secara intensif dengan dinas/OPD yang menangani komoditi terindikasi inflasi |
|    |    | Bagaimana cara TPID menyusun agenda kerja pengendalian inflasi                                                 | Terjadwal dengan baik                                                                                                                                         |
|    |    | Bagaimana cara TPID mengembangkan program-program kerja sesuai dengan permasalahan                             | Melakukan intensitas pedalaman permasalahan dan menindaklanjuti sesuai kebutuhan                                                                              |
|    |    | Bagaimana upaya TPID dalam rangka menurunkan inflasi daerah yang meninggi?                                     | Mengadakan rakor pengendalian inflasi dengan melakukan stakeholder dan mencari pemecahan masalah                                                              |
|    |    | Bagaimanakah loyalitas kerja sesama anggota TPID Provinsi Kalimantan Utara                                     | Bagus                                                                                                                                                         |
|    |    | Bagaimanakah kepatuhan TPID Provinsi Kalimantan Utara terhadap peraturan yang berlaku                          | Bagus                                                                                                                                                         |
|    |    | Bagaimanakah TPID menjalin hubungan dengan masyarakat dan instansi terkait?                                    | Cukup baik                                                                                                                                                    |
|    |    | Bagaimanakah TPID melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan?                               | Belum maksimal                                                                                                                                                |
| 2. | Rs | Apa tujuan dibentuknya TPID bagi Provinsi Kalimantan Utara                                                     | Untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil di Provinsi Kalimantan Utara                                                                                |
|    |    | Apa manfaat dibentuknya TPID bagi Provinsi Kalimantan Utara                                                    | Sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan                              |
|    |    | Apa sajakah yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mengendalikan inflasi daerah | Meakukan rapat koordinasi pada tingkat provinsi dengan mengundang kabupaten/kota                                                                              |
|    |    | Bagaimanakah peran setiap instansi/lembaga/dinas/SKPD di Provinsi                                              | Instansi/SKPD sesuai dengan fungsinya masing-masing. Inflasi inti ada pada perwakilan BI. Volatile food ada pada                                              |

|  |  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Kalimantan Utara dalam mengendalikan inflasi daerah?                                                                                     | disperindagkop dan pertanian. Administered price ada pada SKPD terkait                                                                                                                            |
|  |  | Apakah TPID Provinsi Kalimantan Utara memiliki koordinasi secara intens dengan TPID kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan utara? | Iya, yaitu melalui rapat koordinasi tingkat provinsi dan monitoring yang dilakukan TPID provinsi ke kabupaten/kota                                                                                |
|  |  | Seberapa besar kontribusi adanya TPID Provinsi Kalimantan Utara terhadap pengendalian inflasi daerah?                                    | Secara kuantitatif belum ada pengukuran. Namun secara kualitatif tingkat inflasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sudah ditindaklanjuti oleh Tim TPID Provinsi                           |
|  |  | Kebijakan apa sajakah yang telah disusun oleh TPID dalam rangka mengendalikan inflasi daerah?                                            | Membentuk tim pengendalian inflasi daerah dengan ketua pak gubernur                                                                                                                               |
|  |  | Apakah selama ini kebijakan yang diambil produktif untuk mengendalikan inflasi daerah                                                    | Ya, dengan menindaklanjuti ketiga terjadi inflasi yang tidak wajar                                                                                                                                |
|  |  | Bagaimanakah kualitas TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya pengendalian inflasi daerah?                                            | Baik, dengan memberikan/mengeluarkan rekomendasi kebijakan terhadap inflasi yang terjadi dalam rapat-rapat TPID mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam bentuk kegiatan-kegiatan di lapangan |
|  |  | Bagaimanakah kualitas kinerja instansi-instansi/SKPD terkait dalam upaya pengendalian inflasi daerah selama ini?                         | Baik, dengan selalu menindaklanjuti terjadinya inflasi pada ketiga sektor yang menjadi tanggung jawabnya                                                                                          |
|  |  | Apa kendala TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan pengendalian inflasi daerah                                                | Para spekulan selalu memanfaatkan momen-momen tertentu seperti perayaan hari raya keagamaan untuk menaikkan harga secara tidak wajar                                                              |
|  |  | Bagaimanakah solusi atas kendala tersebut?                                                                                               | Membuat sebuah sistem informasi yang menampilkan setiap harga kelompok barang/jasa penyebab inflasi secara realtime                                                                               |
|  |  | Bagaimanakah cara TPID mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada di lapangan                                                         | Dengan menerima laporan dari masyarakat maupun melakukan monitoring ke lapangan                                                                                                                   |
|  |  | Bagaimana cara TPID menyusun agenda kerja pengendalian inflasi                                                                           | Agenda laju rendah ditentukan dalam peraturan produk undangan dengan koordinasi dengan TPI pusat dan TPID kabupaten/kota secara berkala                                                           |

|   |    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | Bagaimana cara TPID mengembangkan program-program kerja sesuai dengan permasalahan                             | Rapat tim TPID yang dipimpin oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah ditindaklanjuti dengan tim teknis, yaitu dari pangan dan tim transportasi                                                                                                                                        |
|   |    | Bagaimana upaya TPID dalam rangka menurunkan inflasi daerah yang meninggi?                                     | Terhadap kebijakan harga yang dibuat pemerintah dengan menyatukan serah pinjaman kembali kepada kementerian terkait untuk ditinjau kembali harga yang ditetapkan, sehingga harga tidak memberatkan masyarakat. Terhadap harga pangan serta jasa diarahkan dilakukan operasi pasar |
|   |    | Bagaimanakah loyalitas kerja sesama anggota TPID Provinsi Kalimantan Utara                                     | Baik, sesuai dengan tugas dan wewenang serta kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing anggota TPID                                                                                                                                                                            |
|   |    | Bagaimanakah kepatuhan TPID Provinsi Kalimantan Utara terhadap peraturan yang berlaku                          | TPID provinsi kaltara selalu berserat pada koridor yang telah dilakukan oleh peraturan perundang-undangan                                                                                                                                                                         |
|   |    | Bagaimanakah TPID menjalin hubungan dengan masyarakat dan instansi terkait?                                    | Sesuai dengan tugas dan fungsinya, menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaku ekoomi                                                                                                                                                          |
|   |    | Bagaimanakah TPID melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan?                               | Melalui variabel di biro ekonomi.kaltaraprov.go.id dan langsung kepada masyarakat terkait kebijakan baru terkait invlasi                                                                                                                                                          |
| 3 | Sy | Apa tujuan dibentuknya TPID bagi Provinsi Kalimantan Utara                                                     | Tujuan dibentuknya TPID adalah untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi dalam upaya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah                                                                                                         |
|   |    | Apa manfaat dibentuknya TPID bagi Provinsi Kalimantan Utara                                                    | Manfaat dibetnuknya TPID adalah terjaganya laju inflasi yang rendah dan stabil sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya membumikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat                                                        |
|   |    | Apa sajakah yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mengendalikan inflasi daerah | Yang dilakukan oleh TPID :<br>a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa                                                                                                                                        |

|  |  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                          | <p>b. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional</p> <p>c. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistic</p> <p>d. Melakukan koordinasi dengan TPID pusat dan TPID Kabupaten/kota</p> <p>e. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi</p> |
|  |  | Bagaimanakah peran setiap instansi/lembaga/dinas/SKPD di Provinsi Kalimantan Utara dalam mengendalikan inflasi daerah?                   | Peran setiap instansi dalam pengendalian inflasi adalah sebagai kepanjangan tangan dari TPID pusat untuk meakukan upaya dan langkah-langkah teknis dalam upaya pengendalian inflasi sesuai dengan kewenangannya                                                                                                                                                                               |
|  |  | Apakah TPID Provinsi Kalimantan Utara memiliki koordinasi secara intens dengan TPID kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan utara? | TPID memiliki koordinasi secara intens dengan TPID kabupaten/kota melalui rapat koordinasi tingkat provinsi, monitoring ke TPID kabupaten/kota dan sarana informasi melalui group whatsapp                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | Seberapa besar kontribusi adanya TPID Provinsi Kalimantan Utara terhadap pengendalian inflasi daerah?                                    | TPID memiliki kontribusi yang besar dalam pengendalian inflasi di daerah utamanya terhadap inflasi yang disebabkan oleh volatile food (komponen barang bergejolak)                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | Kebijakan apa sajakah yang telah disusun oleh TPID dalam rangka mengendalikan inflasi daerah?                                            | Kebijakan yang telah disusun TPID dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah berupa roadmap pengendalian inflasi daerah                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | Apakah selama ini kebijakan yang diambil produktif untuk mengendalikan inflasi daerah                                                    | Sangat produktif karena di dalamnya mencakup solusi permasalahan jangka pendek dan jangka menengah                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | Bagaimanakah kualitas TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya pengendalian inflasi daerah?                                            | Sangat baik karena terbukti mampu mengendalikan inflasi sesuai target inflasi nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | Bagaimanakah kualitas kinerja instansi-instansi/SKPD terkait dalam upaya pengendalian inflasi daerah selama ini?                         | Kinerja SKPD beum memuaskan karena program dan kegiatan yang telah disusun belum sinkron dengan roadmap pengendalian inflasi daerah                                                                                                                                                                                                                                                           |

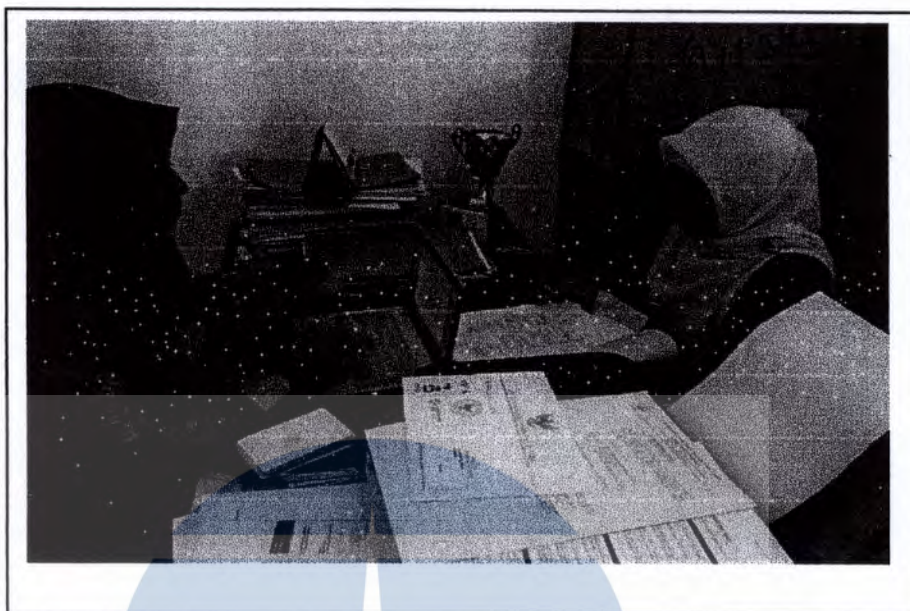
|  |  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Apa kendala TPID Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan pengendalian inflasi daerah | Kendala TPID dalam melaksanakan pengendalian inflasi adalah kurangnya program dan kegiatan yang menyangkut pengendalian inflasi serta evaluasinya di SKPD teknis                  |
|  |  | Bagaimanakah solusi atas kendala tersebut?                                                | Solusinya adalah dengan meningkatkan koordinasi antara TPID dengan SKPD teknis dalam hal kebijakan teknis pengendalian inflasi                                                    |
|  |  | Bagaimanakah cara TPID mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada di lapangan          | Cara TPID mengidentifikasi permasalahan di lapangan melalui analisis terhadap<br>a. pemantauan berita statistic inflasi BPS<br>b. Pemantauan / monitoring harga di beberapa pasar |
|  |  | Bagaimana cara TPID menyusun agenda kerja pengendalian inflasi                            | Agenda kerja TPID disusun mengacu pada roadmap pengendalian inflasi daerah                                                                                                        |
|  |  | Bagaimana cara TPID mengembangkan program-program kerja sesuai dengan permasalahan        | Caranya adalah dengan melaksanakan rapat koordinasi dan FGD untuk menemukan solusi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi                                                       |
|  |  | Bagaimana upaya TPID dalam rangka menurunkan inflasi daerah yang meninggi?                | a. melalui peningkatan koordinasi<br>b. Operasi pasar<br>c. pasar murah<br>d. Memastikan kecukupan stok<br>e. Kerjasama antar daerah<br>f. Peningkatan produktivitas komoditas    |
|  |  | Bagaimanakah loyalitas kerja sesama anggota TPID Provinsi Kalimantan Utara                | Sangat loyal sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya masing-masing anggota                                                                                                        |
|  |  | Bagaimanakah kepatuhan TPID Provinsi Kalimantan Utara terhadap peraturan yang berlaku     | TPID sangat patuh terhadap aturan yang berlaku                                                                                                                                    |
|  |  | Bagaimanakah TPID menjalin hubungan dengan masyarakat dan instansi terkait?               | Melalui pemanfaatan website kaltara dan media masa                                                                                                                                |
|  |  | Bagaimanakah TPID melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan?          | Melalui rapat koordinasi TPID provinsi dan kabupaten/kota                                                                                                                         |



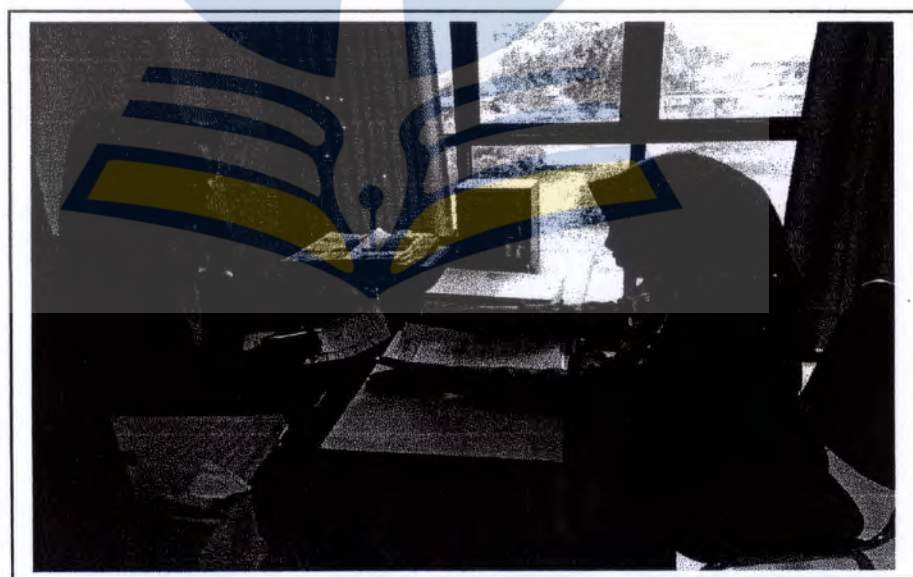
Wawancara dengan Pj. Sekda Provinsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara



Wawancara dengan kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara



Wawancara dengan Kabid Pertanian mewakili Kepala Dinas Pertanian  
Provinsi Kalimantan Utara



Wawancara dengan Kabid Perindagkop mewakili Kepala Dinas  
Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara